

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama					
1.1	Nilai AKIP Kementerian	Nilai	74,5	74,5	74,5**	100%**
1.2	Indeks Kualitas Kebijakan	Persentase	92	20%	20%**	100%**
1.3	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Indeks	1,7	1,7	1,7**	100%**
1.4	Indeks Perencanaan	Persentase	96	25%	25%	100%**
1.5	Capaian Prioritas Nasional	Persentase	100%	100%	25%	100%**
1.6	Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase	100%	25%*	25%**	100%**
1.7	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	91	91	25%	100%**
II	Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas					
2.1	Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular	Persentase	80%	33,3%	33,3%	100%**
2.2	Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan	Persentase	80%	33,3%	33,3%	100%**
III	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif					
3.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Sektor yang Ditindaklanjuti	Persentase	90%	20%	20%	100%**
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya Manajemen Kinerja dan Kerjasama yang Berkualitas					
4.1	Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran, dan Kinerja	Persentase	100%	25%	25%*	100%**
4.2	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase	100%	25%	25%*	100%**
4.3	Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja	Persentase	100%	25%	25%*	100%**
4.4	Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan	Persentase	100%	25%	50%*	120%

4.5	Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi	Persentase	100%	25%	25%	100%**
V	Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas					
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4**	100%**
VI	Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian					
6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Persentase	92%	25%	22,72%*	90,88%
6.2	Nilai AKIP Sekretariat	Nilai	79,5	79,5	79,5**	100%**

Keterangan :

(*) : Masih bersifat prediksi serta target dipecah ke triwulanan dan menjadi dasar perhitungan capaian kinerja

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta *activity* yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan

Kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama ditunjukkan oleh pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai AKIP Kementerian
2. Indeks Kualitas Kebijakan
3. Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)
4. Indeks Perencanaan
5. Capaian Prioritas Nasional
6. Capaian Indikator Kinerja Utama
7. Nilai Kinerja Anggaran

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1. Nilai AKIP
Kementerian**

Latar Belakang

Dasar hukum pelaksanaan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian/Lembaga Adalah Peraturan Menteri PAN-RB No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai Akuntabilitas Kementerian adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan tahunan. Penilaian AKIP meliputi empat komponen, yaitu

- a) Perencanaan Kinerja;
- b) Pengukuran Kinerja;
- c) Pelaporan Kinerja; dan
- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Nilai AKIP diterima setelah pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) setiap tahun.

Berikut ini merupakan komponen penilaian yang menjadi rujukan nilai LHE dengan pembobotan sebagai berikut :

Komponen yang dinilai	Sub Komponen 1 (Keberadaan) 20%	Sub Komponen 2 (Kualitas) 30%	Sub Komponen 3 (Pemanfaatan) 50%	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Klasifikasi Nilai Evaluasi AKIP :

- AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan
- A (Skor > 80-90); Memuaskan
- BB (Skor > 70-80); Sangat Baik
- B (Skor > 60-70); Baik
- CC (>50-60); Cukup
- C (>30-50); Kurang
- D (0-30); Sangat Kurang

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2026, Nilai AKIP Kementerian yang terealisasi sebesar 74,5. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan pada sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang telah selesai dilaksanakan hingga triwulan I 2026, dengan ringkasan :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-1.1				
1.1. Nilai AKIP Kementerian	Nilai	74,5	74,5**	100%

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan.

**nilai SAKIP dikeluarkan di akhir tahun oleh Kemenpan.

Nilai Akuntabilitas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB. Pada triwulan I tahun 2026, belum dapat diukur nilai akhir AKIP 2026 Kementerian. Penilaian Mandiri berdasarkan aktivitas di setiap triwulan dapat menjadi rujukan dalam mengukur hasil akhir nilai yang akan diperoleh pada akhir tahun 2026. Jika berdasarkan surat Kementerian PAN-RB No.B/71/AA.05/2025 tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan bahwa nilai AKIP Kementerian berada

pada nilai 74,32 dengan predikat BB. Maka besar kemungkinan target nilai 74,5 di akhir tahun 2026 dapat tercapai. Pada tahun 2025, implementasi akuntabilitas kinerja berada pada level “Sangat Baik”, yaitu Implementasi AKIP sudah sangat baik pada Kementerian dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Tabel 1.1 Proyeksi Nilai LHE AKIP Kementerian

Evaluasi Per Komponen LHE 2025	LHE 2024	LHE 2025	Proyeksi 2026
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Area Perbaikan : 1. Perbaikan <i>Critical Success Factor (CSF)</i> , Formulasi CSF masih bersifat normatif atau generik, yang belum menggambarkan faktor pengungkit yang dapat mempengaruhi keberhasilan Koordinasi lintas KL dan efektifitas sinkronisasi kebijakan 2. Penyusunan rencana aksi masih berorientasi pada anggaran, bukan pada langkah aksi substantif yang diperlukan. 3. Pelaksanaan rencana aksi tidak terdistribusi secara merata di sepanjang tahun	23,48	23,79	23,85 (+0,06)
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Area Perbaikan : 1. Optimalisasi kembali monitoring dan evaluasi kinerja pada aplikasi kinerja 2. Faktor penghambat yang diidentifikasi pada pengukuran kinerja cenderung berulang tanpa ada rencana tindak lanjut yang jelas 3. Hasil monitoring dan evaluasi laporan yang dilakukan belum dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut	20,22	20,54	20,60 (+0,06)
Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Area Perbaikan : 1. Informasi Benchmarking capaian Kementerian dengan capaian Nasional dalam RPJMN maupun Internasional atas indikator yang diukur belum tertuang dalam LAKIP Kementerian dan unit kerja 2. Pelaporan kinerja yang berkala perlu diperkuat dalam hal progress tindak lanjut dan rencana perbaikan yang telah ditetapkan pada siklus monitoring sebelumnya.	12,91	13,12	13,15 (+0,03)
Nilai Komponen Evaluasi Kinerja Area Perbaikan : 1. Laporan hasil evaluasi akuntabilitas internal unit kerja masih lemah kualitasnya, karena belum menyajikan temuan kritis yang menggambarkan akar masalah dan area kinerja yang perlu diperbaiki	16,71	16,87	16,90 (+0,03)
Nilai Total Evaluasi AKIP Final	73,32	74,32	74,5

Berdasarkan pada table diatas, LHE tahun 2024 s.d 2025 dan target nilai AKIP 2026 menunjukkan tren kenaikan yang bervariasi. Berdasarkan tren kenaikan tahun ke tahun maka dapat diproyeksi target nilai AKIP tahun 2026 dapat tercapai. Sampai dengan triwulan I, Biro MKKS telah menyelesaikan catatan perbaikan di komponen Perencanaan sehingga di proyeksi target kenaikan nilai di komponen dimaksud dapat tercapai. Catatan di komponen lainnya akan dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan di triwulan mendatang.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Nilai AKIP Kementerian			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Identifikasi temuan serta rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2025 dan pemetaan perbaikan di tahun berjalan	Terlaksana	LHE 2025 Kementerian yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB No. B/71/AA.05/2025 termuat nilai Akuntabilitas Kementerian Perekonomian dengan nilai 74,32 dengan predikat “BB” menjadi dasar penyusunan matriks perbaikan AKIP tahun 2026. Matriks perbaikan AKIP Kementerian telah disusun sebagai Upaya nyata dalam menindaklanjuti catatan dan rekomendasi dari Kemenpan RB, sehingga target 74,5 di tahun 2026 dapat tercapai.
2	<i>Coaching clinic</i> penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU tahun 2026	Terlaksana	Pada tanggal, 6 Januari 2026, Sekretariat melalui Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama telah melaksanakan koordinasi dan <i>coaching clinic</i> dengan seluruh unit kerja Eselon I dan II tentang penyusunan Perjanjian Kinerja 2026 dan pembahasan SOTK Kementerian Perekonomian melalui UND. No. AK.01.01/3/SES.M.EKON/01/2026
3	Reviu penetapan <i>Critical Success Factor</i> (CSF) dalam usulan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU 2026	Terlaksana	Sekretariat melalui Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Sekretaris Deputi dan Inspektorat Kementerian, bersama – sama melaksanakan reviu draft penyusunan PK, Renaksi, dan Manual IKU 2026 entitas Eselon I dan II

			Sosialisasi hasil revidi dokumen perencanaan kinerja 2026 bertujuan menjaga kualitas dari Indikator Kinerja yang berbasis SMART-C, Rencana aksi yang terdistribusi sepanjang tahun, dan Manual Indikator yang memuat informasi lengkap, khususnya pada bagian formulasi indikator dan menyempurnakan <i>Critical Success Factor</i> nya
4	Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2026	Terlaksana	Pendampingan dokumen perencanaan kinerja dari awal hingga penetapan, yang meliputi Perjanjian Kinerja, Manual IKU, dan Rencana Aksi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2026 yang telah dilaksanakan oleh entitas Eselon I dan II, disaksikan langsung oleh Menko Perekonomian dalam kegiatan UND. AK/333/SES.M.EKON/01/2026 Seluruh dokumen Perjanjian Kinerja 2026 yang telah ditetapkan di upload ke dalam Aplikasi Kinerja pada sisi Perencanaan. https://kinerja.ekon.go.id
5	Pelaporan Bukti Dukung Akuntabilitas 2025 ke dalam ESR Menpa RB	Terlaksana	Tahun 2025 Kementerian Perekonomian telah mengupload bukti dukung Akuntabilitas Kinerja kedalam Aplikasi ESR Menpan RB pada entitas Eselon I, II, dan Kementerian yang meliputi Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Manual IKU, Renja/RKT, Laporan Kinerja 2025, DPA, Pohon Kinerja/Cascading Kinerja, Tindaklanjut LHE AKIP Internal, Laporan Monev Renaksi, dan Pedoman-pedoman teknis Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja. Seluruh dokumen

			ini tertuang pada website https://Esr.Menpan.go.id
6	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I	Tertunda/ Digeser	Koordinasi permintaan penyusunan laporan kinerja triwulan I seluruh entitas eselon I dan II didasarkan pada amanat Perpres No. 29 tahun 2014 yang mana Eselon I dan II memiliki kewajiban memonitoring capaian indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja secara periodik pada triwulan I tertunda, hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian target di tahun 2026 Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama sebagai koordinator dalam permintaan penyusunan telah menyusun draft laporan kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama pada triwulan I serta mengkoordinasi permintaan penyusunan laporan kinerja triwulan unit kerja entitas eselon I dan II. Laporan Kinerja yang telah disusun akan ditetapkan oleh pimpinan dan diupload ke dalam Aplikasi kinerja Ekon GO. https://kinerja.ekon.go.id
7	Penyusunan draft Revisi Permenko No. 19 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja	Terlaksana	Pada 10 April 2026 telah dilaksanakan Diskusi Lanjutan Final Draft Pembahasan dan Penyusunan Lampiran Revisi Permenko No. 19 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam UND. No. AK.04.01/40/SET.M.EKON. 1/04/2026. Hasil dari rapat ini menghasilkan produk akhir (REVISI) Permenko No. 19 tahun 2022 yang dapat dilihat pada https://bit.ly/3PeuvVu

Upaya-upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

- Penetapan dokumen perencanaan Renstra, DPA, Rencana Kerja tahun 2026 pada level Menteri serta Entitas Eselon I dan II
- Menyusun dan menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis kinerja, berdasarkan *Cascading* Kinerja yang telah ditetapkan
- Menetapkan *draft* laporan kinerja triwulanan untuk seluruh entitas unit kerja level Eselon I dan II
- Menyusun *draft* Nota Dinas permintaan penyusunan laporan kinerja triwulan I dan II pada entitas eselon I dan II
- Mengirim Nota Dinas Permohonan Reviu LAKIP Kementerian 2025 kepada Inspektorat Kemenko Perkonomian
- Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Deputy untuk dapat mereviu LAKIP 2025 Kedeputan (Eselon I tahun 2025)
- Melaksanakan *breakfast meeting* evaluasi capaian kinerja tahun 2025 dan target 2026 yang dihadiri oleh pimpinan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Pelaksanaan kegiatan *Coaching Clinic* dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola kinerja di unit kerja dalam mengelola kinerja dilaksanakan melalui *zoom meeting* dan ruang rapat kantor;
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai (Google Drive, One Drive, dst);
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelola kinerja EKON GO;
- Penetapan *timeline* tindaklanjut dokumen yang harus dihasilkan/disusun oleh entitas unit kerja pada akhir pelaksanaan rapat, hal ini bertujuan agar satu tema substantif dapat diselesaikan dalam satu rapat dan potensi pelaksanaan rapat berulang dengan tema yang sama dapat ditekan.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 134.435.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Perpres terkait RKP yang baru diterbitkan setelah batas waktu penetapan Perjanjian Kinerja, hal ini mengakibatkan Unit Kerja perlu mereviu target kinerja yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja.
2. Masih terdapat rencana aksi yang belum berupa langkah substantif terhadap pencapaian kinerja dan masih bersifat general.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan

dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memantau relevansi target kinerja yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan target pada Dokumen RKP 2026. Apabila ditemukan ketidaksinkronan, maka akan dilakukan pemutahiran target pada triwulan III.
2. Memonitoring pelaporan pelaksanaan rencana aksi unit kerja dan memberikan feedback kualitas rencana aksi melalui Reviu Laporan Kinerja Triwulanan.

1.2. Indeks Kualitas Kebijakan

Latar Belakang

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya dalam pilar tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian perwujudan asta cita ke 7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba, judi serta penyelundupan. Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrument untuk mengukur kualitas kebijakan Pemerintah terutama dampak atau hasil bagi Pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (evidence based). Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (*self-assessment*) yang berfokus pada dampak kebijakan. Indikator indeks kualitas kebijakan juga digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas proses penyusunan, koordinasi, dan implementasi kebijakan publik yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun kriteria pengukuran IKK yaitu dilakukan setiap tahun, ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian, kebijakan pembangunan strategis memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas, dan kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran. Instrumen pengukuran menggunakan 11 pertanyaan. Kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara.

Pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap tahun berdasarkan ketentuan Lembaga Administrasi Negara melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara. Adapun pelaksanaan penilaian IKK Tahun 2025 berpedoman pada Surat Edaran Kepala LAN Nomor 8/K.1/HKM.02.3/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.

Dalam mekanisme penilaian, setiap instansi melakukan pengajuan tiga kebijakan untuk dinilai melalui beberapa tahapan, yaitu penilaian mandiri (*self-assessment*), verifikasi oleh LAN, proses umpan balik (*feedback*), perbaikan dan penyempurnaan dokumen, hingga penetapan hasil penilaian akhir. Instrumen pengukuran IKK terdiri atas 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi utama dengan rincian bobot sebagai berikut:

- Profil dengan bobot 10%
- Perencanaan Kebijakan dengan bobot 20%
- Implementasi Kebijakan dengan bobot 25%
- Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan dengan bobot 30%

- Transparansi dan Partisipasi Publik dengan bobot 15%
- Nilai IKK merupakan indeks komposit tertimbang dari seluruh instrumen pengukuran tersebut dengan kategori penilaian sebagai berikut:
- <50,00 = kurang
 - 50,00 – 64,99 = cukup
 - 65,00 – 79,99 = baik
 - 80,00 – 90,99 = sangat baik
 - 91,00 – 100 = unggul

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan Indeks Kualitas Kebijakan telah memasuki tahapan awal pengukuran yang mencakup penguatan aspek profil dan persiapan penilaian pada dimensi-dimensi utama IKK. Realisasi capaian pada triwulan ini belum berupa nilai indeks final, melainkan progres pelaksanaan tahapan kegiatan yang mendukung proses penilaian tahunan. Pelaksanaan kegiatan IKK dilaksanakan secara bertahap melalui rencana aksi tahunan yang meliputi:

1. Pendataan peraturan/kebijakan untuk objek penilaian Tahun 2026 (Triwulan I)
2. Penetapan objek penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (Triwulan II);
3. Pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*), pengumpulan bukti dukung, pengisian sistem IKK, proses umpan balik, serta perbaikan dan penyempurnaan dokumen (Triwulan III);
4. Penyampaian hasil penilaian akhir IKK oleh LAN (Triwulan IV).

Pada Triwulan I 2026, fokus pelaksanaan kegiatan diarahkan pada identifikasi dan penguatan aspek profil organisasi, antara lain melalui identifikasi sektor kebijakan, penyusunan draft Surat Keputusan Tim Kerja, serta penguatan keterlibatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam proses pengukuran IKK. Adapun capaian indikator kinerja utama sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-1.2				
1.2. Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	20	20	100%

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan. nilai IKK dikeluarkan di akhir tahun oleh LAN.

Berdasarkan hasil penilaian tahun sebelumnya, nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 mencapai 92,42 dari skala 100 dengan predikat “Unggul”. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memenuhi prinsip-prinsip perumusan, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan yang baik. Pada Tahun 2026, pengukuran kualitas kebijakan tetap difokuskan pada kebijakan strategis pemerintah pusat maupun daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan pertumbuhan ekonomi nasional. Penilaian mencakup lima tahapan utama, yaitu Profil, Perencanaan Kebijakan,

Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan kinerja ini disusun sebagai instrumen monitoring dan evaluasi untuk memetakan langkah-langkah strategis dan korektif dalam rangka memastikan pencapaian target IKK Tahun 2026. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, beberapa tahapan yang telah dilaksanakan dalam proses penilaian Indeks Kualitas Kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pelaksana pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan melalui penyusunan Surat Keputusan Tim Kerja yang melibatkan koordinator instansi dan analis kebijakan;
2. Menetapkan dan memastikan keterlibatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam proses pengukuran IKK;
3. Mengidentifikasi dan mengumpulkan populasi kebijakan yang telah disusun dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai objek penilaian Tahun 2026.

Proyeksi capaian Triwulan I Tahun 2026 diperkirakan relatif stabil dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan konsistensi kinerja serta keberlanjutan upaya peningkatan kualitas kebijakan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Selain itu, pada Tahun 2025 telah dilaksanakan *review assessment* terhadap Indeks Kualitas Kebijakan, termasuk evaluasi atas capaian indeks selama tiga tahun terakhir. Proses tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas tata kelola kebijakan sekaligus menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya serta langkah-langkah penguatan yang telah dilakukan, target Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I tahun 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I untuk indikator Indeks Kualitas Kebijakan dilaksanakan sebagai berikut:

IKU. Indeks Kualitas Kebijakan			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Pendataan Populasi Kebijakan untuk objek Penilaian tahun 2026	Terlaksana	Telah dilakukan pendataan terhadap 227 peraturan/kebijakan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan kebijakan lainnya.

Upaya-upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

- Melaksanakan pendataan populasi kebijakan yang akan menjadi objek penilaian IKK Tahun 2026;
- Melakukan pendataan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 421/2024 tentang Penataan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

- Pelaksanaan koordinasi dan rapat dengan penggabungan beberapa agenda pembahasan dalam satu kesempatan;
- Optimalisasi penggunaan fasilitas *Zoom Meeting* untuk mendukung efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan;
- Pemanfaatan media berbagi pakai (*shared platform*) dalam proses pengumpulan dan distribusi data pengelolaan kinerja;
- Pengalokasian hasil efisiensi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 95.567,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Output/keluaran kebijakan belum terstandar antar unit kerja
- Pemahaman instruksi pengukuran belum merata di seluruh unit kerja

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut serta mendukung optimalisasi pencapaian target kinerja pada triwulan selanjutnya, beberapa langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

- Melaksanakan dialog kinerja secara rutin untuk berkoordinasi dengan unit kerja serta pemantauan dan evaluasi kinerja agar berjalan optimal.
- Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan unit kerja untuk meningkatkan pemahaman instrument dan kualitas bukti dukung di tiap kebijakan

1.3. Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)

Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Memasuki Triwulan I Tahun 2026, landasan filosofis ini mengalami pergeseran paradigma ke arah kebijakan

nasional yang lebih komprehensif, di mana Program Prioritas Pemerintah Digital (PP 07.10) dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan arah perluasan transformasi dari semula penataan administratif prosedural (e-Government) bergeser radikal menjadi tata kelola berorientasi outcome dan penciptaan nilai publik secara nyata. Langkah transisi strategis ini diimplementasikan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital dan Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Pemerintah Digital guna menjamin keberlanjutan kinerja digital instansi pemerintah yang bermuara pada masa depan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan serta pengarusutamaan prinsip keterbukaan pemerintahan.

Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital merupakan perombakan menyeluruh cara instansi menilai kinerja digital pemerintah dengan menggeser fokus penilaian dari kapabilitas dan kebijakan di area hulu menjadi kinerja, implementasi, dampak nyata, serta kepuasan pengguna layanan di area hilir. Evaluasi ini dilaksanakan guna mengukur kemajuan pelaksanaan digitalisasi secara riil, mempermudah pengisian, mengurangi beban administratif instansi, sekaligus meningkatkan kualitas data secara nasional. Sesuai dengan fokus RPJMN 2025–2029, ruang lingkup penilaian Indeks Pemerintah Digital dikonsolidasikan ke dalam 7 Aspek Penilaian Utama, yaitu:

- Aspek Tata Kelola dan Manajemen (Bobot 10%), mencakup indikator tata kelola dan manajemen layanan;
- Aspek Penyelenggara (Bobot 10%), mencakup indikator sumber daya manusia dan kolaborasi pemerintah digital;
- Aspek Data (Bobot 15% - Baru), mencakup indikator tata kelola data, operasional spasial, dan pembangunan statistik;
- Aspek Keamanan Pemerintah Digital (Bobot 15%), mencakup indikator audit keamanan, perlindungan data pribadi, penerapan kriptografi, dan kapabilitas penanganan insiden siber;
- Aspek Teknologi Digital (Bobot 10%), mencakup indikator aplikasi dan infrastruktur pemerintah digital;
- Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (Bobot 15% - Baru), mencakup keterpaduan proses bisnis lintas sektor, integrasi aplikasi, portal layanan digital, dan interoperabilitas data;
- Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Bobot 25% - Baru), mencakup fasilitas dukungan pengguna dan tingkat kepuasan pengguna layanan.

Penilaian evaluasi Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) didasarkan pada informasi dan pemenuhan instrumen yang diringkaskan secara radikal dari semula 47 indikator pada SPBE lama menjadi hanya 20 indikator utama pada Indeks Pemerintah Digital. Penilaian ini dilakukan secara integratif dengan memperkuat *Once-Only Principle*, di mana instansi tidak wajib mengisi seluruh dokumen secara tahunan serentak melainkan cukup menyerahkan data satu kali saja melalui koordinasi kolaboratif lintas Kementerian/Lembaga pengampu (seperti Komdigi, Bappenas, BSSN, BIG, BPS, dan BKN). Pada fase peralihan tahun 2026 ini, mekanisme evaluasi digeser menuju skema penilaian yang lebih fleksibel berbasis sinkronisasi data nilai menggunakan instrumen penyesuaian target (Kalkulator Pemdi) guna mengantisipasi konversi instrumen baru demi mencapai pemenuhan target Indeks Pemerintah Digital nasional di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara akuntabel.

Penilaian evaluasi Pemdi didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interview, serta penilaian visitasi. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan penilaian evaluasi Pemdi dapat dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:

Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Aspek 1 - Tata Kelola dan Manajemen	2	10%
Aspek 2 - Penyelenggara	2	10%
Aspek 3 - Data	4	15%
Aspek 4 - Keamanan Pemerintah Digital	4	15%
Aspek 5 - Teknologi Digital	2	10%
Aspek 6 Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	4	15%
Aspek 7 Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	2	25%

Klasifikasi Nilai Pemdi yaitu : (1) Memuaskan rentang 4.0 s.d $\leq$ 5.0; (2) Sangat Baik rentang 3.51 s.d $\leq$ 4.0; (3) Baik rentang 2,51 s.d $\leq$ 3.5; (4) Cukup rentang 1,51 s.d $\leq$ 2,50; dan (5) Kurang rentang 1 s.d $\leq$ 1.5

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I 2026, Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) terealisasi sebesar N/A, hal tersebut dikarenakan belum dilakukan penilaian hingga laporan ini disusun. Namun nilai tersebut akan berubah karena terdapat tahap penilaian dokumen dan finalisasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun tabel perhitungan persentase kinerja Triwulan I sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-1.3				
1.3. Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Indeks	1,7	1,7**	100%**

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan aktivitas yang telah dilaksanakan

Target kinerja Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 1,7. Penetapan target untuk tahun 2026 didasarkan pada target nasional mengingat evaluasi kinerja pemerintahan digital merupakan penilaian baru.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Indeks SPBE Kementerian			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Identifikasi dan penyesuaian indikator antara instrumen penilaian indeks Pemerintah Digital (PEMDI) dengan indikator SPBE	Terlaksana	Dilakukan Identifikasi dan penyesuaian indikator antara instrumen penilaian indeks Pemerintah Digital (PEMDI) dengan indikator SPBE.
2	Menyusun daftar identifikasi risiko penyelenggaraan Pemerintah Digital (PEMDI) serta rumusan strategi pencapaian target nilai indeks indeks Pemerintah Digital (PEMDI) tahun 2026	Terlaksana	Telah Dilakukan Pembahasan Awal Rencana Strategi Implementasi Pemerintah Digital (PEMDI) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3	Penyusunan strategi pemutakhiran Sistem Informasi Arsitektur PEMDI	Terlaksana	Dilakukan Bimbingan Teknis Implementasi SIA-SPBE Versi 3

Upaya-upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

1. Mengikuti Bimbingan Teknik INA-OECD kementerian-kementerian;
2. Melakukan persiapan penyelenggaraan audit TIK;
3. Melakukan Pembahasan Awal Rencana Strategi Implementasi Pemerintah Digital di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Mengikuti Pemberitahuan dan Permintaan Tindak Lanjut Kewajiban Tenant serta Persiapan Rencana Migrasi PDNS ke PDN-1;
5. Mengikuti agenda pembahasan Peta Proses Bisnis Lintas Fungsi (Cross-Functional Map (CFM));
6. Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi SIA-SPBE Versi 3;
7. Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Draft Awal Inputan Peta Rencana SPBE 2026-2030 Pada Aplikasi SIA SPBE Versi 3;
8. Menyusun dan menetapkan Surat Pengantar SK Tim PEMDI 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya telah diselenggarakannya rapat koordinasi terkait Evaluasi kinerja Pemerintah Digital menggunakan aplikasi zoom yang dapat menghemat anggaran. Kemudian penggunaan kembali fasilitas ruang rapat kantor untuk rapat koordinasi sehingga proyeksi efisiensi lebih maksimal dan hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensi

sepanjang triwulan I yaitu Rp. 86.547,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut sebagai berikut :

1. Perubahan jumlah indikator SPBE dari 47 indikator sebelumnya menjadi 20 indikator utama dalam Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) memerlukan waktu dan pemahaman yang mendalam bagi tim teknis internal untuk melakukan identifikasi relevansi dokumen pendukung agar sesuai dengan kriteria aspek yang baru.
2. Keterbatasan sumber daya keamanan siber dan sandi dalam tindak lanjut terkait keamanan Siber.
3. Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur mekanisme audit TIK secara komprehensif.
4. Belum tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang Audit TIK
5. Perubahan SOTK baru dan pengkajian ulang proses bisnis sebagai input utama pada arsitektur SPBE merupakan tantangan yang memerlukan diskusi panjang.
6. Pada aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah memiliki bobot penilaian sebesar 25% yang merupakan tantangan besar di lingkungan Kemenko perekonomian. Hal ini merupakan peluang untuk meningkatkan tingkat kematangan pada aspek dimaksud namun akan menjadi risiko yang besar apabila tidak dapat mengidentifikasi jenis layanan yang sesuai kriteria aspek penilaian pada Pemdi.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu

1. Melakukan akselerasi pemetaan konsep bukti dukung (self-assessment mapping) secara berkala menggunakan instrumen Kalkulator Pemdi serta mengoptimalkan koordinasi internal lintas unit kerja guna menyamakan persepsi kriteria kematangan pada 20 indikator baru.
2. Memperkuat dukungan keamanan siber secara taktis melalui kolaborasi dengan BSSN serta mengoptimalkan pelibatan SDM TI internal yang kompeten untuk mengawal pemenuhan bukti dukung pada Aspek Keamanan Pemerintah Digital.
3. Menyusun kebijakan internal terkait mekanisme audit TIK
4. Mengikuti pelatihan di bidang Audit TIK
5. Melakukan komunikasi proaktif dan intensif dengan instansi terkait mengenai tata cara pelaksanaan audit TIK pada masa transisi.
6. Melakukan koordinasi secara intensif beserta praktisi/narasumber agar penyesuaian arsitektur versi baru dapat berjalan lebih optimal.
7. Memperkuat koordinasi dengan unit kerja pemilik layanan digital pemerintah untuk diskusi terkait proses bisnis layanan digital yang sesuai kriteria aspek penilaian pada Pemdi

1.4. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

Latar Belakang

Indeks Perencanaan Pembangunan merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi,

serta keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan ini. Komponen utama dari penilaian IPPN ini dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun oleh K/L sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Metode pengukuran IPPN dilakukan dengan menilai hasil dari dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun oleh K/L dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun pengukuran. Dikarenakan karakteristik dan mekanisme penyusunannya yang berbeda, maka untuk penilaian terhadap IPPN K/L dilakukan dengan menggunakan parameter yang berbeda.

Penilaian IPPN ini dapat menggambarkan kondisi perencanaan pada instansi dalam hal tingkat keselarasan perencanaan di Pemerintah Pusat, tingkat kesesuaian penganggaran terhadap perencanaan, dan kualitas dokumen perencanaan dalam menyelesaikan isu pembangunan serta mencapai prioritas pembangunan.

Komponen penilaian IPPN adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PENILAIAN	SUB KOMPONEN	DOKUMEN YANG DINILAI
1	Integrasi	Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	Renstra-RPJMN
		Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra	Renstra-Renja
		Kepatuhan Renja terhadap RKP	Renja-RKP
2	Sinkronisasi	Kepatuhan anggaran K/L untuk mencapai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan	RKA-RKP
		Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja	RKA-Renja
		Kepatuhan anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan	RKA-RKP
3	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Target dan Sasaran Pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja Lembaga terkait	RPJMN-Renstra K/L

Pada tahun 2025, IPPN tidak menilai sub komponen 2.a yaitu Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada tahun Perencanaan Rekomendasi yang diberikan oleh penilai untuk meningkatkan indeks perencanaan Kemenko Perekonomian adalah:

1. Penguatan Sinkronisasi Pagu Anggaran
2. Peningkatan Konsistensi Target Rincian Output

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 dengan predikat Sangat Baik dengan nilai 96. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama—dengan tanpa target triwulan. Penilaian IPPN kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah dilakukan dalam rentang nilai dari 1-100, dengan predikat sebagai berikut:

Rentang Nilai	Predikat
91-100	Sangat Baik
81-90	Baik
71-80	Cukup Baik
61-70	Kurang
<60	Sangat Kurang

Pada triwulan I tahun 2026, nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional belum memiliki nilai realisasi, karena hasil penilaian IPPN dilakukan Bappenas dan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Namun, prakiraan dari nilai yang akan diperoleh di akhir tahun dapat diprediksi melalui pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-1.4				
1.4. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks	96%	96%**	100%

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan. karena nilai IPPN dikeluarkan pada akhir tahun.

Berdasarkan kegiatan yang menunjang langsung tercapainya tujuan target yang diharapkan, kegiatan rencana aksi pada Triwulan I tahun 2025 telah tercapai 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Capaian Indeks Perencanaan			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Menyusun Ranwal Renja 2027 dan Reviu Baseline berdasarkan kebutuhan atas Belanja Operasional	Terlaksana	Ranwal dan Reviu Baseline TA 2027 telah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan atas Belanja

	(Belanja Barang dan Pegawai), Belanja Modal, Rincian Output Prioritas (mendukung PN), dan Rincian Output Usulan/Inisiatif Baru.		Operasional (Belanja Barang dan Pegawai), Belanja Modal, Rincian Output Prioritas (mendukung PN), dan Rincian Output Usulan/Inisiatif Baru. • Ranwal Renja telah diusulkan melalui aplikasi KRISNA dan Reviu Baseline diusulkan melalui aplikasi SAKTI dengan mempertimbangkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).
--	---	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan reviu atas usulan kebutuhan anggaran kegiatan strategis dan/atau prioritas untuk menyusun Reviu Baseline TA 2027 pada Triwulan I TA. 2026.
2. Melakukan pembahasan rincian output baru dan rincian output yang mendukung PN dalam Rancangan Renja Kemenko Perekonomian 2027.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Kinerja Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan rapat koordinasi bersama menggunakan via aplikasi Zoom yang dapat menghemat anggaran, pelaksanaan rapat koordinasi yang menggabungkan beberapa agenda.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- 1) Belum ada keselarasan antara Perencanaan Program Kerja Kemenko Bidang Perekonomian dan K/L yang dikoordinasikan.
- 2) Penyusunan Rancangan Renja Kemenko Perekonomian Tahun 2026 terlambat dilakukan karena sampai bulan Maret 2025, Pagu Indikatif TA 2026 belum disampaikan olehb Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan kendala tersebut dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- 1) Penyelarasan Program Kerja bersama K/L di bawah lingkup koordinasi untuk penyusunan Renja tahun 2027.

- 2) Melakukan revisi Renja TA 2026 atas Penetapan Perjanjian Kinerja dan Pemutakhiran RKP 2026
- 3) Melakukan penghitungan kebutuhan anggaran berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh unit kerja.

1.5. Capaian Prioritas Nasional

Latar Belakang

Indeks Perencanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Prioritas Nasional merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana Kemenko Perekonomian berkontribusi secara langsung dalam mengoordinasikan dan mengawal program-program yang mendukung Prioritas Nasional sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis nasional.

IKU ini menilai kinerja efektivitas Output K/L dengan membandingkan capaian dan target Rincian Output (RO) yang mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Nasional.

Penilaian IKU Capaian Prioritas Nasional mengacu pada metodologi evaluasi yang digunakan oleh Kemen PAN-RB melalui lembar kerja evaluasi. Nilai Capaian Prioritas Nasional didapat dari Jumlah target RO yang mendukung Prioritas Nasional yang tercapai dibandingkan dengan Jumlah target RO yang mendukung Prioritas Nasional yang diampu.

Rincian Output yang mendukung Prioritas Nasional di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Adalah:

- Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta Berorientasi Ekspor.
- Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional.
- Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Akses Indonesia ke OECD.
- Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
- Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030.
- Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan.
- Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
- Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi.
- Rekomendasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
- Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan.
- Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja.
- Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe.
- Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Galang Batang.
- Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Gresik.
- Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Sei Mangkei.
- Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan.
- Rekomendasi Kebijakan Penguatan Industri Besi dan Baja.
- Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Semikonduktor.
- Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Nikel.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Hingga Triwulan I tahun 2026, Capaian RO yang mendukung PN berdasarkan activity yang dilaksanakan telah terealisasi sebesar 25%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri oleh unit kerja berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan pada sisi perencanaan, pengukuran,dan pelaporan kinerja yang telah selesai dilaksanakan hingga Triwulan I 2026. dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-1.5				
1.5. Capaian Perencanaan Prioritas Nasional	%	25%	25%	100%

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan.

Laporan kinerja ini dibuat untuk dapat memetakan langkah korektif strategis demi tercapainya target nilai yang ditetapkan, perbaikan format laporan Capaian Prioritas Nasional pada Tahun ini diperuntukan mendukung pelaporan yang lebih komprehensif.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I tahun 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Capaian Indeks Perencanaan Prioritas Nasional			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Pelaporan dan Evaluasi hasil capaian kinerja RO PN tahun 2024	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengumpulan data capaian kinerja RO yang mendukung PN Tahun 2024
2	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan RO PN tahun 2026	Tertunda atau Digeser	Koordinasi penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan RO PN tahun 2026 diundur hingga bulan April 2026
3	Monitoring capaian kinerja RO PN Triwulan I	Tertunda atau Digeser	Capaian kinerja RO PN 2026 belum bisa dilaksanakan karena dalam penyusunan rencana aksi pelaksanaan RO PN, kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan April 2026

Upaya-upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

1. Menyiapkan dokumen capaian RO yang mendukung PN ke dalam *shared drive* agar dapat digunakan sebagai bahan analisis secara bersama.
2. Melakukan koordinasi internal dengan unit terkait dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan RO PN Tahun 2026.
3. Menyiapkan jadwal pelaksanaan koordinasi dan pemantauan secara berkala

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Pemanfaatan rapat koordinasi secara daring
- Optimalisasi penggunaan penyimpanan bersama berbasis *cloud*
- Pemanfaatan data capaian dan dokumen pendukung pada tahun sebelumnya sebagai bahan analisis di tahun ini
- Penggunaan sumber daya manusia yang tersedia secara kolaboratif antar pegawai sesuai tugas dan kompetensinya

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensi sepanjang triwulan I tahun 2026 yaitu Rp. 49.834.787,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Pelaksanaan rencana aksi belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal triwulan I karena masih diperlukan proses koordinasi dan konsolidasi data dengan unit terkait

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Melaksanakan percepatan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja untuk penyusunan rencana aksi guna memastikan ketersediaan data dan bahan pendukung yang dibutuhkan.

1.6 Capaian Indikator Kinerja Utama

Latar Belakang

Indikator capaian indikator kinerja utama adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mencapai target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja. IKU ini dirancang uagar dapat mencerminkan hasil strategis yang ingin dicapai dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Adapun IKU yang menjadi indikator penilaian meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi

2. Biaya logistik
3. Pembentukan modal tetap bruto
4. Rasio PDB industri pengolahan
5. Devisa pariwisata
6. Rasio PDB pariwisata
7. Indeks ketahanan energi
8. Indeks daya saing digital di tingkat global
9. Tingkat inflasi
10. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal
11. Tingkat pengangguran terbuka
12. Indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian
13. Indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang perekonomian
14. Nilai RB Kementerian

Capaian IKU dihitung berdasarkan realisasi terhadap target tahunan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan relevansi, akurasi, dan konsistensi data. Penilaian capaian IKU mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kualitas koordinasi lintas sektor yang menjadi mandat utama Kemenko Perekonomian.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2026, Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian adalah 100%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan hingga Triwulan I 2026. dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-1.6				
1.6. Capaian Indikator Kinerja	%	25%	25%**	100%**

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan.

Nilai capaian indikator kinerja Menteri belum dapat ditentukan karena hasil akhir nilai dikeluarkan pada akhir tahun dan evaluatornya adalah KemenPAN RB. Hasil capaian indikator kinerja dari 3 tahun kebelakang yaitu :

Indikator RB	Skor 2023	Indeks	Skor 2024	Indeks	Skor 2025	Indeks
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	100	5,80 dari 7	100	5,13 dari 7	100	5,20 dari 7

Capaian indikator kinerja dari tahun ke tahun menunjukkan catatan kestabilan dari 3 tahun terakhir. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional selama 3 tahun terakhir, persentase capaian indikator kinerja selalu tercapai pada angka 100%. Pada tahun 2026 diproyeksikan seluruh indikator kinerja memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Adapun indikator yang proyeksikan melebihi target adalah (1) IKU Indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian; (2)

IKU Indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) kebijakan di bidang perekonomian, (3) IKU Nilai RB Kementerian, (4) IKU Rasio PDB pariwisata, (5) IKU Indeks ketahanan energi, (6) IKU Proporsi penciptaan lapangan kerja formal. Namun, dari tren dari tahun sebelumnya, terdapat capaian yang sulit terealisasi diantaranya (1) IKU Pertumbuhan ekonomi, (2) IKU Pembentukan model tetap bruto, (3) IKU Rasio PDB industry pengolahan, (4) IKU indeks daya saing digital di tingkat global, dan (5) Biaya logistik. Pada tahun 2025, capaian dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Adalah 106,5%.

Pelaksanaan Renaksi Triwulan I 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Capaian Indikator Kinerja Utama			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Penyusunan rencana aksi pengawalan capaian IKU Menteri 2026	Terlaksana	Sekretariat melalui Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama telah menyusun rencana aksi pengawalan terhadap rencana aksi pada 14 (empat belas) indikator yang melekat pada rencana aksi unit-unit kerja deputy. Penyusunan rencana aksi pengawalan ini berfungsi untuk mengawasi ketercapaian pelaksanaan rencana aksi pada 14 indikator Menteri. Rencana aksi deputy yang telah terlaksana seluruhnya dituangkan pada laporan kinerja triwulanan deputy. Hingga triwulan I berjalan, terpantau bahwa seluruh rencana aksi deputy yang mengampu 14 indikator Menteri telah terlaksana seluruhnya.
2	Pelaporan capaian kinerja triwulan I Menteri	Tertunda	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama mengampu tugas sebagai PIC dalam penyusunan laporan capaian kinerja Menteri triwulan I 2026. Biro MKKS masih menyusun <i>draft</i> laporan kinerja triwulan I yang kemudian akan ditetapkan

			oleh pimpinan dan di upload kedalam aplikasi berbasis kinerja Ekon GO.
3	Pelaksanaan Forum Dialog Kinerja Organisasi triwulan I	Terlaksana	Dialog kinerja melalui rapat terbatas antara Menteri dengan unit Es. I di lingkungan Kemenko Perekonomian, dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pengawasan atas terlaksananya rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan I 2026 oleh unit kedeputian yang mengampu 14 indikator Menteri.
4	Kickoff TIM PKO	Terlaksana	Diawali dengan koordinasi antara Biro MKKS dengan Tim Inspektorat dalam membahas draft SE Persesmenko tentang Pedoman penilaian kinerja organisasi telah membuahakan produk SE. No.KP.08.01/11/SES.M.EK ON/12/2025 tentang Pedoman Penilaian PKO di lingkungan Kemenko Perekonomian. Dasar terjadinya koodinasi ini untuk menindaklanjuti amanat PermenPANRB No. 22 tahun 2024 tentang Penilaian PKO pada seluruh instansi pemerintahan. Tindaklanjut dari SE. No.KP.08.01/11/SES.M.EK ON/12/2025 adalah dengan diterbitkannya Kepmenko Perekonomian No. 5 tahun 2026 tentang TIM Penilai kinerja Entitas Eselon I unit kerja. Tim penilai ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu TIM Pengarah dan Tim Pelaksana. TIM Pengarah dan TIM Pelaksana memiliki tugas yang tertuang pada Kepmenko EKON. Keduanya bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.

Upaya-upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

- Memanfaatkan capaian tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan program prioritas Kementerian
- Meningkatkan kualitas sosialisasi kebijakan yang merupakan langkah strategis untuk mencapai target kinerja melalui berbagai platform digital.
- Membangun ekosistem Penilaian Kinerja Organisasi melalui Pembentukan Tim Penilai PKO.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Sentralisasi Dashboard Data Langganan berbagai pakai yang dapat mendukung kualitas kebijakan yang digunakan
- Optimalisasi Dashboard Data Perekonomian Internal

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensi sepanjang triwulan I yaitu Rp. 92.834.787,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Masih terdapat unit kerja yang belum menetapkan SK Tim Penilaian Kinerja Entitas Eselon II tepat waktu.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Memonitoring pembentukan SK Tim Penilaian Kinerja Entitas Eselon II

1.7 Nilai Kinerja Anggaran

Latar Belakang

Pada Pasal 244 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA melakukan evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian. Dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana diamanatkan pada peraturan diatas, perlu adanya pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dilakukan melalui pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara periodik melaporkan data aspek evaluasi kinerja anggaran melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kemenkeu. Adapun beberapa data yang dilaporkan

melalui SAKTI adalah Capaian Rincian Output, capaian sasaran program dan capaian sasaran strategis. Kemudian berdasarkan data yang diinput tersebut, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang terhubung dengan SAKTI melakukan perhitungan secara otomatis dan menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran yang disampaikan Kementerian Keuangan secara periodik. Nilai kinerja anggaran dimaksud adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input yang dimasukan setiap Satuan Kerja Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke dalam aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan.

Sejak tahun 2024, penilaian NKA menggunakan rentang nilai dengan lima kategori mengacu kepada PMK Nomor 62 tahun 2023 yaitu:

No.	Rentang Nilai	Kategori
1.	Nilai NKA > 90	Sangat Baik
2.	$80 < \text{Nilai NKA} \leq 90$	Baik
3.	$60 < \text{Nilai NKA} \leq 80$	Cukup
4.	$50 < \text{Nilai NKA} \leq 60$	Kurang
5.	Nilai NKA < 50	Sangat Kurang

Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran dilakukan pada akhir tahun oleh Kemenkeu. Pada Kinerja Triwulan I Tahun 2026, Persentase pencapaian Nilai Kinerja Anggaran berdasar aktivitas yang dilaksanakan diperkirakan telah tercapai sebesar 25% dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-1.7				
1.7. Nilai Kinerja SMART Anggaran	Nilai	25%	25%	100%**

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan.

Dengan mendorong realisasi Nilai Kinerja Anggaran untuk mencapai target, diharapkan secara tidak langsung unit kerja akan berusaha mencapai target capaian mulai dari Realisasi Rincian Output, Capaian Output Program, Capaian Sasaran Program dan Capaian Sasaran Strategis serta memperhatikan Standar Biaya Keluaran yang berarti pengelolaan dan kinerja anggaran pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian semakin berkualitas.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I tahun 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Nilai Kinerja Anggaran			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Pelaporan Capaian Indikator Kinerja, Sasaran Strategis, Capaian Indikator Kinerja Program, dan Capaian Rincian Output pada Triwulan I Tahun 2026	Digeser atau Tertunda	Kegiatan pelaporan capaian IKU, SS, IKP, dan RO pada triwulan I tahun 2026 akan digeser pada triwulan II tahun 2026
2	Monitorong efisiensi dan efektivitas penggunaan Standar Biaya Keluaran Triwulan I Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilakukan Pemantauan efisiensi dan efektivitas standar biaya
3	Berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait untuk monitoring Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada triwulan I Tahun 2026	Terlaksana	Telah Dilakukan Koordinasi Dengan Unit Kerja

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengisian *self assessment* Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada aplikasi SMART DJA untuk menentukan kriteria tiap indikator
2. Melakukan fasilitasi pelaporan capaian output bulanan melalui file berbagi pakai, untuk menjembatani antara aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan dan e-Monev Bappenas.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Sentralisasi Dashboard Data Langganan berbagai pakai yang dapat mendukung kualitas kebijakan yang digunakan
- Optimalisasi Dashboard Data Perekonomian Internal

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensi sepanjang triwulan I yaitu Rp. 31.123.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Pelaksanaan pelaporan capaian IKU, SS, IKP, dan RO Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena masih diperlukan proses konsolidasi dan validasi data capaian dari unit kerja terkait

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Melakukan percepatan koordinasi dan sinkronisasi data dengan unit kerja

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular
2. Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular

Latar Belakang

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Tingkat Input Material Sirkular. Proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dikategorikan efektif dan efisien apabila telah melalui setidaknya 3 proses tahapan yaitu:

- Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan;
- Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan; dan
- Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi.

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan tingkat input material sirkular dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori:

Tahap 3, bobot 33,3%

Tahap 2, bobot 33,3%

Tahap 1, bobot 33,3%

Penentuan Bobot ini didasarkan pada penugasan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yakni analisis dan harmonisasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional, dan melaksanakan manajemen kinerja, serta kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator.

Adapun nilai dari persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait tingkat input material sirkular diperoleh melalui penilaian dari 3 (tiga) tahapan siklus bisnis proses dalam sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan sebagai berikut:

Tahap Pertama : Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan

Pada tahap ini, Biro MKKS mengidentifikasi faktor kunci isu dan permasalahan terkait tingkat input material sirkular, melakukan sinkronisasi isu/permasalahan dengan dokumen rencana pembangunan nasional, dan menetapkan fokus

koordinasi dan rencana aksi yang akan dilakukan dalam 1 (satu) tahun ke depan (Agenda Setting). Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain:

- Undangan rapat dan daftar hadir;
- Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
- Analisis kebijakan dalam bentuk Paparan/Telaahan staf/Policy brief.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, notula rapat/paparan/risalah, dan hasil analisis kebijakan terkait.

Tahapan Kedua : Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan

Tahapan pelaksanaan koordinasi kebijakan berisikan identifikasi stakeholder yang terlibat, pembentukan tim koordinasi, pelaksanaan koordinasi dan rencana aksi yang bertujuan untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahap pertama. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain:

- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan;
- Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan rapat dan daftar hadir, Notula Rapat/Paparan/Risalah, dan konsep kajian/telaahan staf terkait.

Tahapan Ketiga: Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini Biro MKKS berkoordinasi dengan K/L terkait untuk melakukan monitoring melalui pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi terhadap hasil koordinasi dan tindak lanjut untuk perbaikan di masa mendatang.

Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini, antara lain:

- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terkait tingkat input material sirkular.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2026, Persentase Penyelesaian Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Tingkat Input Material Sirkular telah terealisasi sebesar 33,3%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu pada tahap pertama: Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan terkait Tingkat Input Material Sirkular hingga Triwulan I 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-2.1				
2.1.Persentase				
Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja	%	33,3%*	33,3%	100%

**nilai merupakan target triwulanan*

Penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Tingkat Input Material Sirkular telah memasuki pada tahap pertama yaitu Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/permasalahan tingkat input material sirkular. Sesuai dengan amanat dalam RPJMN 2025-2029, Kemenko Bidang Perekonomian mengampu indikator Program Prioritas (PP) Ekosistem Ekonomi Sirkular yaitu Tingkat Input Material Sirkular. PP tersebut mendukung Prioritas Nasional 2 Sasaran 6 yaitu Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau (di bawah Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi).

Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang menerapkan pendekatan sistemik untuk meminimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai. Terdapat 3 arah kebijakan dan indikator utama Ekonomi Sirkular di Indonesia, antara lain:

- Pengurangan penggunaan sumber daya dengan indikator Tingkat Input Material Sirkular. Indikator ini mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam produksi barang atau jasa. 'Tingkat Input Material Sirkular' tidak hanya mencakup penggunaan bahan daur ulang tetapi juga bahan yang digunakan kembali - termasuk *reuse*, *refurbish*, remanufaktur, dan penggunaan bahan terbarukan dalam sebuah produk. Indikator ini serupa dengan 'tingkat penggunaan secondary raw material' dan 'konten daur ulang', namun memiliki cakupan yang lebih luas yang mempertimbangkan semua jenis penggunaan bahan sekunder. Dengan baseline target tahun 2023 sebesar 9%, target pada 2026 sebesar 9,4% dan pada 2029 sebesar 10%.
- Perpanjangan daya guna produk dan material, dengan indikator Tingkat Daya Guna.
- Peningkatan daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi, dengan indikator Tingkat Daur Ulang.

Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang berfokus pada 5 sektor prioritas dan aspek pendukung ekosistem sebagai acuan para pemangku kepentingan dalam mendorong transisi dari ekonomi linear menjadi sirkular di Indonesia. Lima sektor utama prioritas penerapan ekonomi sirkular di Indonesia antara lain: Pangan, Retail (fokus pada kemasan plastik), elektronik, konstruksi, dan tekstil). Kelima sektor ini mempresentasikan hampir 1/3 dari PDB Indonesia dan mempekerjakan >43 juta orang pada 2019.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, dalam pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Tingkat Input Material Sirkular, disampaikan sebagai berikut:

- Menyusun perencanaan kerja dan rencana aksi serta analisis mendalam terhadap sektor dan isu yang dikawal oleh Kemenko Perekonomian.
- Mendata kebijakan dan regulasi serta stakeholder yang terkait dengan Tingkat Input Material Sirkular.
- Melaksanakan FGD Penerapan Ekonomi Sirkular di Daerah dengan mengundang narasumber dari Pemkab Banyumas dan Pemprov Jawa Tengah.

Proyeksi triwulan I tahun 2026 tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2025. Hal ini didorong oleh kegiatan sinkronisasi dan koordinasi Tingkat Input Material Sirkular sudah dilaksanakan sejak awal tahun melanjutkan kegiatan dari tahun 2025. Mengingat koordinasi dan sinkronisasi yang cukup intens dalam mengidentifikasi isu dan sinkronisasi kebijakan di triwulan I 2026 maka diprediksi penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I tahun 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Pembahasan bersama KemenPPN/Bappenas dan K/L atas cascading Program Prioritas Ekonomi Sirkular dalam RPJMN 2025-2029	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi <i>Technical Committee Meeting</i> Proyek <i>Green Economic Recovery</i> (GER) pada 29 Januari 2026. • Rapat koordinasi <i>Circular Economy Executive Dialogue</i> 2026 yang diselenggarakan BRIN pada 12 Februari 2026.

Upaya-upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

- FGD Penerapan Ekonomi Sirkular di Daerah yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada 23 Januari 2026.
- Rapat koordinasi *kick-off* proyek pengembangan daur ulang baterai kendaraan listrik dan manajemen elektronik sirkular pada 27 Februari 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

- Melaksanakan koordinasi dan rapat beberapa tema rapat dalam 1 kesempatan yang sama

- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau *workshop*
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 71.964.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Belum terselesaikannya pemetaan urgensi dan kelembagaan dalam penerapan ekonomi sirkular

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam pembahasan identifikasi isu/permasalahan terkait dengan Tingkat Input Material Sirkular
- Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja dalam mengidentifikasi program kerja yang nantinya akan berkaitan dengan Tingkat Input material Sirkular.

2.2 Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan

Latar Belakang

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan. Proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dikategorikan efektif dan efisien apabila telah melalui setidaknya 3 proses tahapan yaitu:

- Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan;
- Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan; dan
- Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi.

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori:

Tahap 3, bobot 33,3%

Tahap 2, bobot 33,3%

Tahap 1, bobot 33,3%

Penentuan Bobot ini didasarkan pada penugasan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yakni analisis dan harmonisasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi

kinerja sasaran pembangunan nasional, dan melaksanakan manajemen kinerja, serta kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator.

Adapun nilai dari persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan diperoleh melalui penilaian dari 3 (tiga) tahapan siklus bisnis proses dalam sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan sebagai berikut:

Tahap Pertama: Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan

Pada tahap ini, Biro MKKS mengidentifikasi faktor kunci isu dan permasalahan terkait pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan, melakukan sinkronisasi isu/permasalahan dengan dokumen rencana pembangunan nasional, dan menetapkan fokus koordinasi dan rencana aksi yang akan dilakukan dalam 1 (satu) tahun ke depan (Agenda Setting). Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain:

- Undangan rapat dan daftar hadir;
- Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
- Analisis kebijakan dalam bentuk Paparan/Telaahan staf/Policy brief.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, notula rapat/paparan/risalah, dan hasil analisis kebijakan terkait.

Tahapan Kedua: Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan

Tahapan pelaksanaan koordinasi kebijakan berisikan identifikasi stakeholder yang terlibat, pembentukan tim koordinasi, pelaksanaan koordinasi dan rencana aksi yang bertujuan untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahap pertama. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain:

- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan;
- Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan rapat dan daftar hadir, Notula Rapat/Paparan/Risalah, dan konsep kajian/telaahan staf terkait.

Tahapan Ketiga: Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini Biro MKKS berkoordinasi dengan K/L terkait untuk melakukan monitoring melalui pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi terhadap hasil koordinasi dan tindak lanjut untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini, antara lain:

- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terkait pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2026, Persentase Penyelesaian Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan telah terealisasi sebesar 33,33%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu pada tahap pertama: Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan terkait Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan hingga Triwulan I 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-2.2				
2.2. Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan				
	%	33,33	33,33	100%

**nilai merupakan target triwulanan*

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, indikator Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) merupakan indikator yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Indikator ini mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) 4 bidang pembangunan sumber daya manusia yang mencakup penguatan sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam kerangka tersebut, PPLP ditetapkan sebagai indikator ke-6 pada Program Prioritas 04.19 Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan.

PPLP memiliki peran strategis dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk laki-laki dan perempuan serta memantau perkembangan kesenjangan ekonomi berbasis gender. Capaian indikator ini menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan yang lebih merata dan inklusif. Selain itu, PPLP memberikan gambaran mengenai perkembangan kondisi ekonomi laki-laki dan perempuan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang responsif gender dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) merupakan indikator yang mengukur besaran pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga. Perhitungannya menggunakan pendekatan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga antarwilayah serta pembobotan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2026, target pengeluaran perkapita laki-laki sebesar Rp17.138 ribu per tahun dan perempuan sebesar Rp10.086 ribu per tahun. Adapun pada akhir periode RPJMN tahun 2029, nilai PPLP ditargetkan meningkat menjadi Rp17.899 ribu untuk laki-laki dan Rp10.603 ribu untuk

perempuan. Target tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan bagi laki-laki maupun perempuan.

Meskipun tren PPLP ditargetkan terus meningkat, pencapaian target tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi laki-laki dan perempuan secara berbeda. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja, dominasi laki-laki pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas dan pendapatan lebih tinggi, serta masih adanya kesenjangan upah menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat pengeluaran per kapita. Di samping itu, keterlibatan perempuan dalam kegiatan kewirausahaan masih relatif terbatas dan belum sepenuhnya didukung oleh akses yang setara terhadap teknologi digital maupun layanan keuangan. Kondisi tersebut tercermin dari tingkat literasi dan inklusi keuangan perempuan yang masih berada di bawah laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan melalui pengarusutamaan gender agar peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, dalam pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan, disampaikan sebagai berikut:

- Biro MKKS mengawal indikator RPJMN 2025-2029 yang diampu oleh Kemenko Bidang Perekonomian, salah satunya yaitu terkait Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan
- Menyusun perencanaan kerja dan rencana aksi serta analisis mendalam terhadap sektor dan isu yang dikawal oleh Kemenko Perekonomian.
- Sinkronisasi kebijakan terkait peningkatan partisipasi ekonomi perempuan melalui identifikasi hambatan struktural ketenagakerjaan, peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penguatan keterampilan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektor yang mendukung pencapaian indikator Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) dengan LPEM UI.

Proyeksi triwulan I tahun 2026 tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2025. Kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sehingga diprediksi penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I tahun 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Identifikasi Isu dan Permasalahan	Terlaksana	Telah dilaksanakan identifikasi isu dan

			permasalahan terkait Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan melalui partisipasi dalam <i>Validation Meeting</i> kajian "Dari Potensi ke Partisipasi: Apa yang Membuat Perempuan Berpotensi Tinggi Memilih untuk Tidak Bekerja?" pada 28 Januari 2026.
2	Sinkronisasi kebijakan terkait Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan	Terlaksana	Telah dilaksanakan sinkronisasi kebijakan melalui pembahasan dan pemetaan kebijakan terkait peningkatan partisipasi ekonomi perempuan serta pengisian Evaluasi PUG mandiri sebagai penguatan basis data dan kebijakan responsif gender dalam mendukung pencapaian indikator PPLP.

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

- Pengisian Evaluasi PUG mandiri melalui aplikasi evaluasi PUG sebagai instrumen pemetaan kondisi demografi sekaligus penguatan basis data kesetaraan gender di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa, 24 Februari 2026.



Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai

- Pemanfaatan data dan hasil kajian yang telah tersedia sebagai bahan identifikasi isu dan permasalahan terkait Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan.
- Pelaksanaan koordinasi dan pembahasan secara terintegrasi dengan agenda kegiatan yang telah ada sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 89.996.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Capaian indikator Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) dipengaruhi oleh berbagai faktor lintas sektor sehingga memerlukan koordinasi dan sinergi dengan banyak kementerian/lembaga terkait.
- Masih terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi partisipasi ekonomi perempuan, antara lain beban pengasuhan, keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja, serta kesenjangan keterampilan yang dapat berdampak pada capaian indikator PPLP.
- Ketersediaan data dan informasi pendukung yang diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator masih perlu diperkuat melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya dan rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi laki-laki dan perempuan.
- Melakukan identifikasi dan pendalaman isu strategis yang memengaruhi partisipasi ekonomi perempuan melalui forum koordinasi, rapat, dan pemanfaatan hasil kajian dari berbagai pemangku kepentingan.
- Memperkuat pengumpulan dan pemanfaatan data serta informasi pendukung sebagai dasar perumusan kebijakan dan rekomendasi yang mendukung pencapaian indikator PPLP.
- Mendorong penguatan perspektif gender dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi ekonomi perempuan.

3

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efektif

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efektif ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti

Latar Belakang

Persentase rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang dimanfaatkan dalam bentuk naskah kedinasan dan/karya tulis ilmiah yang ditindaklanjuti atau dimanfaatkan dalam bentuk disposisi pemanfaatan yaitu meliputi :

1. Penggunaan dalam penyusunan bahan koordinasi internal, lintas sektor, maupun tingkat nasional;
2. Penggunaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan; dan
3. Penggunaan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan.

Indikator ini mengukur efektivitas koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang dilaksanakan melalui forum koordinasi, fasilitasi, dan sinergisitas antar Kementerian/Lembaga. Indikator Utama ini menekankan outcome, tingkat penerimaan dan pemanfaatan konkret dari hasil koordinasi yang telah dilaksanakan.

Adapun rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang diampu oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 adalah:

1. Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kegiatan ini mencerminkan peran dari Kemenko Bidang Perekonomian dalam memastikan kebijakan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara tepat waktu, terintegritas, dan berdampak. Melalui koordinasi ini diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak terjadi duplikasi kebijakan, stagnasi pelaksanaan, atau konflik kepentingan antar Kementerian/Lembaga.
2. Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mencerminkan keadilan dan distribusi yang merata antardaerah, antarwilayah, serta kelompok masyarakat.

Rumus Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Ditindaklanjuti:

$$\% \text{ R. Kebijakan Lintas Sektor} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang terselesaikan}} \times 100$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2026, Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti telah terealisasi sebesar 20%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu pada proses penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektoral hingga Triwulan I 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-3.1 3.1. Perempuan Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan	%	20%	20%	100%*

**Hasil Realisasi dan %Kinerja berdasarkan pengukuran activity, karena nilai persentase baru bisa diketahui pada akhir tahun.*

Berdasarkan kegiatan yang menunjang langsung tercapainya tujuan target yang diharapkan, kegiatan rencana aksi pada Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai sebesar 20%. Persentase rekomendasi kebijakan lintas sektor yang ditindaklanjuti baru dapat diketahui nilainya pada akhir tahun.

Kebijakan lintas sektor yang aktivitasnya telah dilaksanakan hingga Triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Syariah

Ekonomi dan keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, baik di tingkat global maupun nasional. Indonesia turut mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah. Berbagai pencapaian di level internasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri ini. Pada tahun 2023 dan 2024, Indonesia berhasil meraih peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index, yang menunjukkan kekuatannya sebagai destinasi utama wisata halal global. Selain itu, Indonesia juga menduduki posisi ketiga dalam sejumlah indikator ekonomi syariah global.

Selain keuangan syariah, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di Industri halal, yang mencakup makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dan pariwisata, menjadi pilar penting ekonomi syariah dengan nilai pasar global USD 2,4 triliun pada 2024. Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 42 Tahun 2024 telah memperkuat sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tetapi keterbatasan auditor halal, biaya sertifikasi bagi UMKM, dan kurangnya standar halal internasional menghambat daya saing.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, dalam pencapaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan Ekonomi Syariah, disampaikan sebagai berikut:

- Melakukan pembahasan rancangan Program Kerja Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam.
- Mengawal Pembahasan Isu Halal dan Isu Strategis Lainnya pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART) dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).
- Monitoring implementasi serta kerja sama sektor prioritas, khususnya terkait sertifikasi halal dan fasilitasi perdagangan dalam kerangka Pasar Tunggal Uni Eropa (EU Single Market).

2. Indonesia National Single Window (INSW)

INSW merupakan sistem elektronik nasional yang mengintegrasikan proses perizinan ekspor, impor, dan logistik antar instansi pemerintah dalam satu platform digital. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window, tujuan utama INSW adalah meningkatkan sinergi dan kolaborasi kementerian/lembaga dalam memberikan efisiensi layanan publik yang terintegrasi serta terdigitalisasi di

bidang ekspor, impor, dan logistik. INSW terus berupaya untuk meningkatkan daya saing nasional, kinerja logistik nasional, iklim ekosistem investasi, serta memberikan kemudahan berusaha.

Isu strategis yang akan diselesaikan pada tahun 2026 antara lain: penyesuaian regulasi PP Nomor 28 Tahun 2025, integrasi layanan e-SKA, perluasan implementasi komoditas SIMBARA, migrasi sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM), serta mekanisme pengawasan *Strategic Trade Management* (STM). PP Nomor 28 Tahun 2025 telah mengamanatkan agar perizinan ekspor, impor, serta pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor (Iartas) dan neraca komoditas (NK) diajukan melalui sistem INSW. Indonesia juga akan menerapkan Strategic Trade Management (STM) dalam rangka pengawasan ekspor. Hal ini dikarenakan STM menjadi salah satu persyaratan dalam negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat.

Hingga triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan pembahasan terkait Indonesia Single Risk Management (ISRM) dalam rangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) Tahun 2025-2026 Khususnya pada agenda Penguatan Tata Kelola Impor yang melibatkan Tim STRANAS PK dan Lembaga National Single Window (LNSW) dengan tujuan memperkuat manajemen resiko yang terintegritas dan meminimalkan korupsi dalam tata kelola impor. Telah disepakati migrasi *system engine* manajemen resiko dari Ditjen Bea Cukai ke LNSW secara penuh Tujuannya agar formula *scoring* dan parameter resiko dapat digunakan secara terpusat oleh seluruh K/L.

3. Patriot

Sebagai bagian dari pelaksanaan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada Prioritas Nasional (PN) 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dan menindaklanjuti Matriks Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2025-2029 pada tahun 2025, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus melaksanakan pendampingan, koordinasi, dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan integrasi pembinaan ideologi Pancasila dengan agenda pembangunan nasional berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata.

Kemenko Perekonomian, melalui Biro MKKS turut mendukung penguatan koordinasi dan penyamaan persepsi lintas K/L terkait tujuan, sasaran, dan indikator pembinaan ideologi Pancasila agar pelaksanaannya berjalan selaras dan terukur. Hingga triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan pembahasan Ekspose Capaian Kegiatan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam kegiatan ini, membahas penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, ke depan akan dilakukan inventarisasi praktik baik, penyelarasan indikator pelaksanaan, serta penguatan integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam program dan kebijakan pembangunan nasional guna memastikan implementasi berjalan konsisten.

Proyeksi triwulan I tahun 2026 tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2025. Hal ini dikarenakan indikator penyelesaian rekomendasi lintas sektor dapat dilaksanakan dengan baik pada triwulan I. Identifikasi isu dan permasalahan, serta sinkronisasi dan koordinasi kebijakan

lintas sektor telah dilaksanakan dan diprediksi penyelesaian rekomendasi kebijakan lintas sektor dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I tahun 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Identifikasi Isu dan Permasalahan	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Internal Pemetaan Indikator, Isu, dan Usulan Program Kerja Tahun 2026 terkait dengan Ekonomi Syariah. • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Program Kerja Komite Pengembangan UMKM Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) pada 21 Januari 2026. • Rapat Pembahasan Isu Halal dan Isu Strategis Lainnya pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART) Indonesia – Amerika Serikat pada 13 Maret 2026. • Rapat Finalisasi Usulan Program Kerja Bidang VIII Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia pada 22 Januari 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan ISRM dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) KPK pada 04 Februari 2026 • Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Pengisian Form Quick Win Program Moderasi

			Beragama pada 12 Maret 2026.
2	Penyusunan dan Pemutakhiran data terkait kebijakan lintas sektoral	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Pembahasan Ekspose Capaian Kegiatan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Kementerian/Lembaga Tahun 2025 pada 20 Januari 2026 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Indonesia Single Risk Management dengan LNSW dan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) KPK pada 25 Februari 2026.

Upaya-upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

- Menyusun bahan Ekonomi Syariah Indonesia dalam acara Seminar Internasional BPOM : *“Advancing Vaccines and ATMPs Regulatory Development and R&D Ecosystem Pathways from Upstream to Downstream”* pada 28 Januari 2026
- Menghadiri FGD Rancangan Hukum dan Regulasi *Strategic Trade Management* (STM) di Indonesia pada 5 Februari 2026
- Menghadiri Sosialisasi Standar Tata Kelola Pengembangan Layanan SINSW pada 10 Februari

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai.
- Dilakukan kolaborasi pembiayaan dengan stakeholder terkait.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 50.545.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih perlunya penyelarasan program kerja diantara Komite Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam IAEI

2. LNSW terkendala dalam penerapan kebijakan ISRM dikarenakan secara eksplisit tidak memiliki mandat sebagai dasar hukum terkait kewenangan pengelolaan manajemen Risiko terintegrasi serta pemanfaatan *risk scoring* lintas Kementerian/Lembaga

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja di tiap kementerian/lembaga terkait.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) Ke 4: Terselenggaranya Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja
2. Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran
3. Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja
4. Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan
5. Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja

Latar Belakang

Penyelarasan program, anggaran, kinerja, dan kebijakan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan efektif. Upaya ini dilaksanakan untuk memastikan adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan adanya penyelarasan, setiap unit kerja diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, mendukung prioritas pemerintah, serta memperkuat peran koordinasi kementerian dalam memastikan keselarasan indikator kinerja utama (IKU) di berbagai tingkatan

Kegiatan penyelarasan ini bertujuan untuk memperjelas peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam dokumen RPJMN melalui penyusunan peta utama, peta prioritas nasional, serta peta strategi kementerian yang dapat menjadi acuan bersama. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk merumuskan indikator kinerja yang selaras dengan karakteristik dan fungsi unit kerja, sehingga setiap unit dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan indikator kinerja utama kementerian hingga tingkat deputy.

Lebih lanjut, proses ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci koordinasi yang harus menjadi fokus perhatian, termasuk memastikan kesesuaian tugas dan fungsi antarunit, konsistensi antar dokumen perencanaan nasional, serta keterhubungan indikator kinerja pada setiap level melalui mekanisme cascading. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya strategi perbaikan kinerja yang berkesinambungan, sehingga

pelaksanaan program dan kegiatan kementerian dapat berjalan lebih terarah, terukur, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga akhir Kinerja Triwulan I tahun 2026 nilai realisasi pengukuran aktivitas IKU Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran, dan Kinerja sebesar 25%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-4.1 4.1.Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja	%	25%	25%	100%

**Hasil Realisasi dan %Kinerja Triwulan I berdasarkan pengukuran activity, karena nilai dikeluarkan diakhir tahun.*

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I tahun 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Penyusunan Kerangka Faktor Ekonomi yang akan digunakan dalam perencanaan program, anggaran, dan kinerja	Terlaksana	Berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan. Melakukan pemetaan dukungan terhadap sasaran, indikator dan target yang terkait dengan bidang perekonomian dan/atau yang secara langsung harus dikawal oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2	Identifikasi ruang lingkup koordinasi berdasarkan dokumen RPJMN	Terlaksana	Merumuskan keterkaitan Dokumen Turunan RPJMN (Rancangan RKP 2027) dengantugas dan fungsi Kemenko Perekonomian sebagai persiapan

			penyusunan Renja Kemenko Perekonomian tahun 2027
3	Menyusun matriks penilaian indikator kinerja	Terlaksana	Telah disusun matriks penilaian indikator kinerja sebagai acuan dalam pengukuran dan evaluasi capaian kinerja program, anggaran, dan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penyusunan matriks dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran, indikator, dan target
4	Reviu usulan IKU	Terlaksana	Telah dilakukan reviu terhadap usulan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan memperhatikan keselarasan dengan dokumen RPJMN 2025– 2029, tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta prinsip indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu (SMART). Hasil reviu digunakan sebagai dokumen final penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2026

Upaya-upaya nyata dalam kegiatan – kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

- Memetakan sasaran dan indikator Pembangunan Nasional mengacu pada dokumen Rancangan RKP 2027 yang terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

- Memaksimalkan penggunaan fasilitas zoom meeting
- Pengumpulan dan sharing data pengelolaan kinerja melalui media berbagai pakai (Google Drive)

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 37.545.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Kinerja Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Sinkronisasi pagu hasil revisi DIPA ke Sistem Krisna-Renja khusus pada program koordinasi kebijakan belum dapat dilakukan disebabkan sedang dilakukan pemutakhiran sistem Krisna-Renja

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Berkoordinasi secara bilateral bersama unit kerja eselon II yang terkait dengan kebijakan hilirisasi dan investasi dengan Direktorat PEMPMP Bappenas dan Direktur Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi
- Berkoordinasi dengan unit kerja untuk pengusulan TOR dan RAB terkait rencana Rincian Output yang akan dihasilkan pada TA 2026
- Mengakomodasi kebutuhan anggaran sesuai dengan skala prioritas untuk perencanaan tahun 2026

4.2 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran

Latar Belakang

Dokumen Program dan Anggaran terdiri dari Dokumen Perencanaan Tahunan (Renja K/L, RKA-K/L dan DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Revisi POK, Revisi Renja Tahun Berjalan, Revisi DIPA Induk.

Setiap tahun Menteri/Kepala Lembaga menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan serta mengacu pada program kerja K/L tahun selanjutnya. Rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan disebut juga Siklus Perencanaan dan Penganggaran yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, K/L mengacu pada PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan RKA-K/L dan DIPA yang berisi tentang petunjuk dan tata cara penyusunan dan penelaahan dokumen perencanaan program dan anggaran yang berwujud dalam dokumen RKA-K/L dan DIPA. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran dilakukan pada tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Petunjuk teknis dari penyusunan dokumen perencanaan juga mengacu dan berpedoman pada Perdirjen Anggaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L. Penyusunan Rencana dan Program ini meliputi perencanaan program, perencanaan anggaran, serta pelaksanaan dan penyalarsan program dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk selanjutnya perencanaan yang disusun ini akan menjadi keluaran berupa dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja

K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L). Baik Renja maupun RKA K/L merupakan produk perencanaan yang dihasilkan dari siklus tahunan (berulang setiap tahunnya).

Selain perencanaan tahunan, dalam pelaksanaan anggaran juga dibutuhkan penyesuaian dokumen perencanaan pada tahun berjalan yang tertuang pada dokumen POK dan Revisi DIPA. Perubahan pada dokumen POK dan Revisi DIPA merupakan hasil dari penyesuaian yang dilakukan unit kerja terhadap rencana pelaksanaan program dan anggarannya. Penyesuaian tersebut kemudian akan ditindaklanjuti melalui mekanisme revisi anggaran dan/atau revisi informasi kinerja pada dokumen perencanaan. Revisi anggaran akan mengacu pada PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sedangkan penyesuaian Renja K/L akan mengacu Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

Persentase Penyelesaian Dokumen Program dan Anggaran yang Tepat Waktu merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses penyelesaian dokumen yang efektif. Proses penyelesaian dikatakan efektif dan berkualitas apabila penyusunan dokumen program dan anggaran terkait layanan perencanaan dan tugas serta fungsi Biro Perencanaan dapat diselesaikan sesuai dengan janji layanan atau tepat pada waktu yang ditetapkan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga akhir Kinerja Triwulan I tahun 2026 nilai realisasi pengukuran aktivitas IKU Persentase Penyelesaian Dokumen Program dan Anggaran yang Tepat Waktu sebesar 25%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-4.2				
4.2. Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	%	25%	25%	100%

**Hasil Realisasi dan %Kinerja Triwulan I berdasarkan pengukuran activity, karena nilai dikeluarkan diakhir tahun.*

Berdasarkan kegiatan yang menunjang langsung tercapainya tujuan target yang diharapkan, kegiatan rencana aksi pada Triwulan I tahun 2026 telah tercapai 25%.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I tahun 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU.			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Menyusun Revisi Renja 2026 sesuai dengan Pemutakhiran RKP 2026	Tertunda	Proses revisi Renja 2026 dilakukan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan target pada Pemutakhiran RKP 2026 serta penyesuaian Dokumen perencanaan K/L dengan dokumen perencanaan pembangunan belum dapat diselesaikan pada Triwulan I karena menunggu finalisasi Pemutakhiran RKP 2026 ditetapkan. Pada Triwulan I, Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama baru menyelesaikan inventarisasi substansi yang harus direvisi.
2	Menyusun Ranwal Renja 2027 dan Reviu Baseline 2027 berdasarkan kebutuhan atas Belanja Operasional (Belanja Barang dan Pegawai), Belanja Modal, Rincian Output Prioritas (mendukung PN), dan Rincian Output Usulan/Inisiatif Baru	Terlaksana	Penyusunan Ranwal Renja 2027 telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja operasional, usulan RO baru dan prioritas nasional, serta telah dikompilasi dalam dokumen perencanaan internal.
3	Melakukan revisi POK setiap bulan pada tanggal 25 dan revisi DIPA setiap triwulan (apabila diperlukan).	Terlaksana	Revisi POK dan revisi DIPA telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Melakukan revisi DIPA dengan tujuan pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan strategis dan/atau prioritas pada Triwulan I TA. 2025.
- Mengidentifikasi isu strategis, tantangan, dan program kerja yang dapat dikawal oleh Unit Kedeputan dalam penyusunan Renstra K/L 2025-2029.

- Penyelesaian revisi POK sesuai yang diusulkan oleh unit kerja pada Triwulan I TA 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

1. Optimalisasi aplikasi kinerja EKON GO dalam pengelolaan kinerja pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
2. Penggunaan sarpras ruang rapat kantor untuk optimalisasi koordinasi secara terintegrasi dengan unit kerja
3. Penggunaan media digital (Cloud) dan aplikasi kinerja untuk mengurangi penggunaan kertas sebagai dokumen bukti dukung
4. Sinkronisasi pelaksanaan beberapa kegiatan dalam satu agenda kerja
5. Pembagian tugas dan peran yang jelas dengan PIC pengelolaan kinerja pada setiap unit kerja

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 52.129,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Kinerja Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Adanya efisiensi anggaran untuk Tahun Anggaran 2026.
2. Pagu Indikatif untuk Tahun Anggaran 2027, belum ditetapkan hingga akhir Maret 2026. Sehingga berdampak pada penyusunan Renja dan RKA K/L.
3. Penghitungan kebutuhan anggaran: belanja operasional, belanja modal, dan belanja pegawai sebagai dasar reviu *baseline*.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka telah disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyelarasan Program Kerja bersama K/L di bawah lingkup koordinasi untuk penyusunan Renja tahun 2027.
2. Melakukan penghitungan kebutuhan anggaran berdasarkan perencanaan kegiatan prioritas pada triwulan I dan melakukan skema *refocusing* atau realokasi anggaran internal apabila memungkinkan.
3. Memprioritaskan program yang akan dilaksanakan agar anggaran lebih efisien tanpa mengurangi kualitas dari output program.
4. Memperkuat koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal K/L yang terkait pada penetapan pagu indikatif.
5. Menyelenggarakan forum koordinasi rutin antara Kemenko Perekonomian dan K/L untuk menyelaraskan perencanaan program.
6. Menggunakan metode berbasis kinerja dan data historis dalam perhitungan kebutuhan anggaran, serta melibatkan unit teknis dalam penganggaran.

4.3 Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja

Latar Belakang

Persentase penyelesaian penyelarasan kerja sama dan kinerja merupakan ukuran dalam mengintegrasikan dokumen tata kelola pemerintah secara lebih strategis. Kegiatan ini menghasilkan dokumen :

1. Perjanjian Kinerja (PK)
2. Laporan kinerja triwulanan
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
4. Dokumen bukti dukung
5. *Memorandum of Understanding*

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelaksanaan proses bisnis terkait tata Kelola kerja sama dan kinerja, untuk dapat memperoleh nilai akhir dari IKU ini adalah dengan membagi antara jumlah dokumen yang diselesaikan dengan jumlah dokumen yang ditetapkan dikali dengan 100%.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan I tahun 2026, Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja adalah 25%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan hingga triwulan I 2026. dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-4.3 4.3.Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja	%	25%	25%	100%*

***nilai dihasilkan di akhir tahun*

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja tahun 2025	Terlaksana	Penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2026 telah dilaksanakan oleh Sekretariat pada level Eselon I dan II yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

			Seluruh dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat yang telah ditetapkan di upload ke dalam Aplikasi Kinerja pada sisi Perencanaan. https://kinerja.ekon.go.id
2	Penetapan konsep draf laporan kinerja triwulan I	Tertunda	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama masih menyusun laporan kinerja triwulan I untuk level eselon I dan II. Sub-bab laporan capaian kinerja terdiri dari : (1) Tabel ringkasan capaian kinerja triwulan I tahun 2026, (2) Latar belakang IKU, (3) Hasil pengukuran kinerja, (4) Pelaksanaan rencana aksi, capaian program dan efisiensi penggunaan sumber daya, (5) Kendala dan upaya perbaikan pencapaian target. Seluruh konsep laporan kinerja triwulan I untuk level eselon I dan II dapat diperoleh pada link https://bit.ly/3PuZDAq
3	Identifikasi dokumen kinerja yang belum selaras dengan indikator kinerja unit kerja	Terlaksana	Dokumen perencanaan kinerja terdiri dari RPJMN, RENSTRA, RKP, RKA, Renja, dan Perjanjian Kinerja. Biro MKKS telah mengidentifikasi indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja yang belum selaras dengan dokumen perencanaan. Biro MKKS memiliki fungsi pengoordinasian dan pemantauan untuk mengevaluasi indikator kinerja unit kerja agar selaras dengan dokumen kinerja. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Biro MKKS, seluruh indikator kinerja unit kerja telah selaras dengan dokumen perencanaan kinerja
4	Rapat koordinasi awal pengelolaan kinerja dengan unit kerja	Terlaksana	Pada tanggal, Januari 2026, Sekretariat melalui Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama telah melaksanakan koordinasi dan <i>coaching clinic</i> dengan seluruh unit kerja Eselon I

			dan II tentang penyusunan Perjanjian Kinerja 2026 melalui UND. No. AK.01.01/3/SES.M.EKON/01/2026
5	Melaksanakan pendamping penyusunan panduan kinerja dan kerja sama yang selaras dengan sasaran dan indikator kinerja	Terlaksana	Sekretariat melalui Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Sekretaris Deputy dan Inspektorat Kementerian, bersama – sama melaksanakan reviu draft penyusunan PK, Renaksi, dan Manual IKU 2026 entitas Eselon I dan II

Upaya nyata dalam kegiatan – kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi indikator kinerja dengan dokumen perencanaan kinerja nasional pada seluruh unit kerja
2. Memanfaatkan hasil dari capaian tahun sebelumnya sebagai landasan dasar penyusunan proyeksi target ditahun berikutnya
3. Melaksanakan finalisasi dan penetapan Perjanjian Kinerja pada level entitas Eselon I dan II secara tepat waktu
4. Menyusun konsep/*draft* laporan kinerja triwulanan berbasais hasil monitoring dan evaluasi
5. Mengoptimalkan fungsi aplikasi kinerja EKON GO untuk pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja
6. Mengidentifikasi kesesuaian antara indikator kinerja, target dan sasaran strategis dengan dokumen perencanaan nasional
7. Rapat koordinasi yang dilaksanakan, diakhiri dengan tindak lanjut hasil rapat sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan kinerja
8. Memberikan asistensi dan konsultasi kepada unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja
9. Melaksanakan reviu bersama inspektorat Kementerian untuk melihat kesesuaian atau ketidaksesuaian indikator kinerja dengan dokumen perencanaan nasional dan visi misi Kementerian.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

6. Optimalisasi aplikasi kinerja EKON GO dalam pengelolaan kinerja pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
7. Penggunaan sarpras ruang rapat kantor untuk optimalisasi koordinasi secara terintegrasi dengan unit kerja
8. Penggunaan media digital (Cloud) dan aplikasi kinerja untuk mengurangi penggunaan kertas sebagai dokumen bukti dukung
9. Sinkronisasi pelaksanaan beberapa kegiatan dalam satu agenda kerja
10. Pembagian tugas dan peran yang jelas dengan PIC pengelolaan kinerja pada setiap unit kerja

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan

sepanjang triwulan I yaitu Rp. 86.776,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapatnya perbedaan pemahaman antar unit kerja terkait indikator kinerja dan target kinerja
2. Kesesuaian penyampaian dokumen pendukung kinerja

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Pelaksanaan FGD, duduk bersama dalam menyelaraskan pemahaman antar unit kerja dan target kinerja
2. Memberikan pemahaman kepada unit kerja tentang kesesuaian dokumen pendukung kinerja

4.4 Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan

Latar Belakang

Persentase penyelesaian standar keluaran kebijakan merupakan ukuran yang menggambarkan capaian atas penyelesaian dokumen standardisasi keluaran kebijakan. Dokumen standar keluaran kebijakan ini merupakan sebuah dokumen berbentuk pedoman dan/atau produk hukum untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui penerapan standardisasi keluaran kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tiap unit kerja.

Tahapan penyusunan standar keluaran kebijakan:

- (1) pengumpulan data,
- (2) penyusunan rancangan standar keluaran kebijakan,
- (3) pembahasan rancangan standar keluaran kebijakan,
- (4) penyusunan dokumen pedoman standar keluaran kebijakan, dan
- (5) diseminasi/sosialisasi penerapan standarisasi keluaran kebijakan.

Keluaran/output yang dihasilkan/ditargetkan:

1. Data dan Undangan rapat serta daftar hadir
2. Notula/Risalah/Berita Acara
3. Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf
4. Draft dokumen pedoman standar keluaran kebijakan
5. Dokumen Pedoman Standar keluaran kebijakan

Rumus Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan:

$$\% \text{Penyelesaian Standar Kebijakan} = \frac{\text{Jumlah Tahapan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Output yang Ditargetkan}} \times 100$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2026, Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan telah terealisasi sebesar 50%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu pada tahap pengumpulan data, penyusunan rancangan/draft standar keluaran kebijakan, pembahasan rancangan standar keluaran kebijakan, dan penyusunan dokumen pedoman

standar keluaran kebijakan. Berikut ringkasan realisasi kinerja pada Triwulan I 2026:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-4.4				
4.4. Pesentase Penyelesaian Standar Kebijakan	%	25\$	50%	100%

**Target tahunan **target triwulanan.*

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu penerapan standardisasi keluaran kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Dalam rangka pemutakhiran keluaran kebijakan dan perbaikan tata kelola diperlukan penyusunan standar keluaran kebijakan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kewajiban pelaporan kinerja penyusunan kebijakan, menyajikan capaian penyelesaian Standar Keluaran Kebijakan sesuai target yang ditetapkan dan mengidentifikasi hambatan serta merumuskan tindak lanjut perbaikan. Pengukuran Kinerja dalam penyelesaian Standar Kebijakan pada Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan melakukan penajaman dan penyempurnaan dokumen pedoman standar keluaran kebijakan yang telah dikonsolidasikan dengan himpunan masukan konsultasi teoritis dan praktis secara eksternal dan eksternal.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I tahun 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Penetapan Standar Keluaran Kebijakan	Terlaksana	Telah dilakukan penyempurnaan atas dokumen Standar Keluaran Kebijakan
2	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Standar Keluaran Kebijakan	Belum Terlaksana	Didahului finalisasi penetapan dokumen Standar Keluaran Kebijakan. Pelaksanaan direncanakan pada Triwulan II Tahun 2026

Realisasi capaian pada Triwulan I tahun 2026 mencerminkan penyelesaian tahapan penyempurnaan substansi standar keluaran kebijakan. Adapun tahapan diseminasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis belum terlaksanakan dikarenakan penyelesaian finalisasi penetapan dokumen pedoman. Kegiatan tersebut akan

menjadi fokus pelaksanaan pada periode berikutnya untuk memastikan implementasi standar dilakukan secara efektif di seluruh unit kerja.

Upaya-upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

1. Telah dilakukan pengumpulan data serta pelaksanaan studi pustaka dalam penyusunan Standar Kebijakan, serta melaksanakan rapat koordinasi dan pembahasan substansi dengan unit terkait di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Melakukan penyempurnaan rancangan pedoman berdasarkan hasil pembahasan dan masukan pemangku kepentingan internal.

Tabel 3.1 Bentuk Keluaran pada Setiap Jenjang Penandatanganan

No	Tahapan/ Aspek	Jenjang	Bentuk Keluaran														
			Politik Strategis	Politik Operasional	Makalah Kebijakan	Artikulasi Kebijakan	Nasihat Urgensi	Memo Rahasia/ RD	Rahasia Permanen	Telaahan Staf	Juklak /Juknis	Buku Referensi Kebijakan	Laporan Kegiatan	Laporan Evaluasi Kebijakan/ RP	Dasar hukum Sistem	Hasil Konsultasi	Rancangan Kebijakan
1	Perencanaan Kebijakan	Kelompok Kerja (Pokja)	V	V	V	V		V	V	V						V	
		JPT Pratama	V	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V		V	V
		JPT Madya	V	V			V					V	V	V			V
2	Implementasi Kebijakan	Pokja		V				V	V								
		JPT Pratama		V	V	V		V	V		V		V	V	V		
		JPT Madya		V				V			V	V	V	V			

35

Pedoman Standar Keluaran Kebijakan

No	Tahapan/ Aspek	Jenjang	Bentuk Keluaran														
			Pol cy Bri ef	Pol cy Pap er	Ma kul ah Keb jak an	Arti kel Keb jak an	Has rah Urg ensi	Me mo rah Keb jak an/ RD	Has rah Per men test	Te lah Sta f	Juk lak /du ku a	Buk u Ref ere nsi Keb jak an	Lap ora n Has rah Keb jak an	Lap ora n Eva lusi Has rah Keb jak an/ RP	Das hbo ard Sist em	Has rah Keb jak an	Ran gan Keb jak an
3	Evaluasi dan Keterlanjutan Kebijakan	Pokja			V			V	V	V							
		JPT Pratama		V		V		V	V				V		V	V	
		JPT Madya		V				V					V			V	V
4	Transparansi dan Partisipasi Publik	Pokja				V		V	V								
		JPT Pratama						V	V							V	V
		JPT Madya						V								V	

36

Pedoman Standar Keluaran Kebijakan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Melaksanakan koordinasi dan rapat beberapa tema rapat dalam 1 kesempatan yang sama
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
3. Pengumpulan dan sharing data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan

sepanjang triwulan I yaitu Rp. 83.545,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain penyusunan Standar Keluaran Kebijakan merupakan inisiatif yang relatif baru sehingga belum tersedia referensi atau praktik baku yang dapat dijadikan acuan secara langsung; dan Pada periode pelaporan, kegiatan masih difokuskan pada penyusunan dan penyempurnaan substansi standar, sehingga tahapan sosialisasi dan bimbingan teknis belum dapat dilaksanakan.

Berdasarkan kendala tersebut dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Dialog kinerja perlu dilaksanakan secara rutin dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja tepat waktu dan tepat sasaran sehingga berjalan optimal.
- Memperkuat mekanisme koordinasi lintas unit sejak tahap awal penyusunan SKK.

4.5 Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi

Latar Belakang

Salah satu bentuk penyelenggaraan fungsi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama dalam menjalankan tugasnya diantaranya adalah pelaksanaan penataan data dan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini sejalan dengan implementasi Pemerintah Digital dalam rangka menuju *Good Governance* dimana semangatnya adalah untuk menjamin transparansi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Sejalan dengan reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mencapai *Good Governance* melalui Pemerintah Digital merupakan sebuah bentuk transformasi proses yang harus terwujud dalam organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Oleh karena itu peranan sistem informasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Menyadari pentingnya peranan TIK dalam sistem pemerintahan dan didorong dengan pesatnya perkembangan TIK pada era digital informasi dewasa ini, maka dukungan infrastruktur TIK, pengembangan perangkat lunak serta keamanan informasi yang baik sangat mutlak diperlukan. Ditunjang dengan pengelolaan dan perencanaan kebutuhan TIK yang baik, diharapkan dapat menunjang operasional TIK dalam rangka menunjang bisnis proses institusi secara keseluruhan.

Selain itu, pengelolaan data juga menjadi kebutuhan yang mendasar dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Ketersediaan data yang berkualitas akan memberikan landasan yang kuat bagi penyusunan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para pemangku kepentingan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga akhir triwulan I 2026 nilai realisasi pengukuran aktivitas IKU Persentase penyelesaian penataan data dan sistem informasi sebesar 25%. dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-4.5				
4.5 Persentase				
Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi	%	25%	25%	100%*

**** Hasil Realisasi dan % Kinerja Triwulan I berdasarkan pengukuran activity saja**

Berdasarkan kegiatan yang menunjang langsung tercapainya tujuan target yang diharapkan, kegiatan rencana aksi pada Triwulan I tahun 2026 telah tercapai 25%. Berdasarkan hasil capaian kinerja triwulan I dan upaya yang akan dilakukan di triwulan mendatang maka target kinerja tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I tahun 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Menyediakan sumber data eksternal	Terlaksana	Telah disediakan sumber data eksternal
2	Menyusun Identifikasi Kegiatan Statistik Sektoral	Terlaksana	Telah dilakukan identifikasi kegiatan statistik sektoral
3	Menyusun strategi tanggap insiden siber	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan strategi tanggap insiden siber
4	Pengembangan Aplikasi Sistem Elektronik	Terlaksana	Telah dilakukan pengembangan dan pembaharuan pada aplikasi sistem elektronik
5	Monitoring Pemanfaatan Sistem Informasi dilingkungan Kementerian	Terlaksana	Telah dilakukan pemantauan atas pemanfaatan sistem informasi

6	Mitigasi risiko keamanan siber	Terlaksana	Telah dilakukan penguatan keamanan siber di lingkungan Kementerian
---	--------------------------------	------------	--

Upaya-upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

- Melakukan penyediaan langganan data eksternal berupa layanan data Bloomberg dan CEIC dengan mekanisme permintaan data reguler dan *sharing* data melalui koneksi jarak jauh;
- Melakukan penyediaan layanan *video meeting/conference/webinar*;
- Melakukan penyediaan layanan email ekon;
- Melakukan penyediaan layanan pusat data termasuk dengan pusat data nasional;
- Penyediaan layanan hosting dan domain manajemen aplikasi ekon.go.id;
- Melaksanakan penyediaan data BPS tarif 0 rupiah melalui aplikasi silastik;
- Melakukan penyediaan layanan internet;
- Melakukan registrasi pembaharuan Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Melakukan peluncuran website *Learning Management System* (LMS) bernama academy.ekon.go.id;
- Mengembangkan *Dashboard* Sistem Informasi Inspektorat;
- Melakukan pembaruan pada sistem informasi kepegawaian yaitu website absen, cuti dan sdm.ekon.go.id;
- Melakukan penarikan data *website* TPIN atas permohonan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan;
- Mengikuti sosialisasi terkait Strategi Mitigasi Risiko dan Penanganan Insiden Keamanan Informasi;
- Mengidentifikasi aset informasi kritis dan risiko keamanan siber yang melekat;
- Melakukan *backup* data secara berkala;
- Melakukan pemantauan aktivitas anomali pada jaringan dan sistem informasi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

1. Mengurangi jumlah langganan data dengan memaksimalkan fungsi koneksi remote.
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah kesulitan dalam menentukan 2 kegiatan statistik sektoral untuk Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu aktif berkoordinasi dengan instansi Pembina satatistik (BPS).

5

Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) Ke 5: Terwujudnya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama diukur melalui Survei Kepuasan Layanan dengan responden para pejabat dan pegawai diluar Sekretariat Kemenko Perekonomian. Fokus pertanyaan pada Survei Kepuasan adalah jenis layanan yang dilaksanakan oleh Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama pada masing-masing kelompok substansi. Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama merupakan pertanggung jawaban atas seluruh pelaksanaan layanan yang telah diberikan. Penilaian dilakukan berdasarkan 5 (lima) aspek kualitas pelayanan, yaitu:

1. Ketanggapan Layanan (Responsiveness)
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan, atau kebutuhan layanan.
2. Keandalan Layanan (Reliability)
Mengukur sejauh mana layanan diberikan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku.
3. Sarana dan Prasarana Layanan (Tangibles)
Menilai ketersediaan serta kualitas fisik/fasilitas, termasuk tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan.
4. Kepastian Layanan (Assurance)
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta membangun kepercayaan dan rasa aman.
5. Sikap dalam Layanan (Empathy)
Menunjukkan perhatian dan kepedulian personal secara ramah, manusiawi, dan sesuai kebutuhan penerima layanan.

Seluruh aspek tersebut dirata-rata untuk dapat menghasilkan Indeks Kepuasan Layanan, yang dikategorikan dalam 4 (empat) tingkat penilaian:

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rerata hasil koesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian, yaitu :

1. Sangat Puas (4), rentang nilai 3,51 s.d 4
2. Puas (3), rentang nilai 3,01 s.d 3,50
3. Tidak Puas (2), rentang nilai 2,51 s.d 3,00
4. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2,50

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2026, Nilai Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama belum ada, dengan ringkasan table triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-5.1				
Indeks Kepuasan				
Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	3 dari 4	3	3 (Baik)*	100%

Laporan Survei Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada Semester I dan II. Pada semester I dilaksanakan pada bulan Juni 2026 dan Semester II dibulan Desember 2026. Kemudian pada akhir tahun, kedua nilai tersebut di rerata untuk mendapatkan nilai akhir indeks kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama. Pada tahun 2025, indeks final kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama adalah 3,52 dengan predikat Sangat Baik, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Ketanggapan pelayanan (*Responsiveness*), indeks 3,49 – Sangat Baik
- (2) Keandalan pelayanan (*Reability*), indeks 3,50 – Sangat Baik
- (3) Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*), indenks 3,47 – Sangat Baik
- (4) Kepastian pelayanan (*Assurance*), indeks 3,55 – Sangat Baik
- (5) Sikap dalam pelayanan (*Emphaty*), indeks 3,59 – Sangat Baik

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I tahun 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Melaksanakan kegiatan <i>coaching</i> dan bimbingan	Terlaksana	Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi, serta kapasitas pegawai melalui proses pendampingan, arahan, dan konsultasi secara berkelanjutan
2	Melakukan evaluasi layanan kepuasan tahun 2025 untuk penyempurnaan tahun 2026	Terlaksana	Kegiatan ini dilaksanakan untuk menilai tingkat kualitas layanan, efektivitas pelaksanaan, serta tingkat kepuasan pengguna layanan selama tahun 2025. Evaluasi ini dilakukan melalui

			identifikasi masukan, kendala, dan kebutuhan pengguna sebagai bahan analisis dalam menyusun langkah perbaikan dan pengembangan layanan pada tahun 2026
3	Internalisasi penguatan pelayanan melalui penyelenggaraan sosialisasi/workshop penguatan kapasitas SDM	Terlaksana	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan kesadaran pegawai dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan
4	Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana layanan pada triwulan I	Terlaksana	Upaya ini dilaksanakan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan layanan melalui penyediaan, pemanfaatan, serta peningkatan kualitas fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam proses pelayanan

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

1. Identifikasi permasalahan dan meningkatkan kompetensi pegawai
2. Analisis hasil survey dan identifikasi area perbaikan
3. Penyusunan rencana tindak lanjut penyempurnaan layanan tahun 2026
4. Peningkatan pemahaman pegawai terkait standar dan budaya pelayanan
5. Pemeliharaan dan optimalisasi fasilitas pendukung layanan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

1. Optimalisasi aplikasi zoom untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam forum rapat koordinasi dan pendampingan
2. Penggunaan aplikasi penyimpanan berbasis Cloud, seperti Gdrive
3. Optimalisasi aplikasi kinerja Ekon GO
4. Optimalisasi laporan kendala aplikasi dan jaringan data informasi
5. Evaluasi layanan program anggaran, layanan data system informasi, layanan fasilitasi penguatan kinerja dan layanan analisis kebijakan kepada penerima layanan

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 14.656,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

3. PIC di masing-masing substantif tertentu di unit kerja yang terus berganti-ganti, sehingga proses sosialisasi dan pendampingan kurang efektif

4. Jumlah responden dari unit kerja Kedeputan yang masih sedikit, hal ini berdampak pada keajegan hasil survey dan ruang lingkup perbaikan yang harus dilakukan belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

3. Pencatatan PIC substantif unit kerja dan Integrasi PIC ke dalam SK Pokja terkait.
4. Memperpanjang rentang waktu pengisian Survey Kepuasan.

6

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) Ke 6: Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
2. Nilai AKIP Sekretariat

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1 Persentase

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama adalah ukuran dari tingkat pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro MKKS. Penilaian RB pada level Eselon II mengacu pada implementasi renaksi RB General. Persentase dari pelaksanaan renaksi dihitung dengan cara membandingkan antara total jumlah rencana aksi yang terlaksana dengan total jumlah rencana aksi yang ditetapkan. Pada tahun 2026, Biro MKKS menetapkan pelaksanaan RB yang meliputi :

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General
2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB
3. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
4. Tingkat Maturitas SPIP
5. Nilai SAKIP
6. Indeks Perencanaan Pembangunan
7. Tingkat Digitalisasi Arsip
8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
9. Indeks Tata Kelola Pemerintahan
10. Indeks Sistem Merit
11. Capaian IKU
12. Opini BPK
13. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
14. Survei Penilaian Integritas (SPI)
15. Indeks BerAKHLAK

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan I tahun 2026, Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian adalah 90,88%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran

aktivitas yang telah dilaksanakan hingga triwulan I 2026. dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-6.1				
6.1 Persentase Pelaksanaan				
Reformasi Birokrasi	%	25%	22,72	90,88%
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama				

***nilai dihasilkan di akhir tahun*

Dari 11 rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh Biro MKKS pada triwulan I, hanya 1 rencana aksi yang tertunda atau digeser. Adapun rencana aksi yang tertunda atau digeser ini diakibatkan karena keterlambatan Kemenpan RB dalam memberikan hasil penilaian di tahun 2025. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses sirkulasi yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi, terkait dengan penyusunan RPeres Renaksi RB tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB	Tertunda dan Digeser	Pada triwulan ke I 2026, draft Persesmenko tentang Rencana Aksi RB General dan Tematik tahun 2026 masih dalam finalisasi. Kendala yang ada disebabkan karena kebijakan Peta Jalan RB dari Kementerian PAN RB yang belum tersosialisasikan mengenai RB Tematik yang akan ditetapkan di tahun 2026. Sehingga menghambat penetapan Persesmenko tentang Rencana Aksi RB tahun 2026, maka berakibat pada terhambatnya pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB General dan RB Tematik belum dapat dilaksanakan.

			Penetapan finalisasi dokumen Persesmenko 2026 tentang Rencana Aksi RB di lingkungan Kemenko Ekon akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
2	Penyusunan dan penetapan PK, Renaksi, dan Manual IKU	Terlaksana	Penetapan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Kemenko Perekonomian pada entitas eselon I dan II telah dilaksanakan. Kegiatan ini dihadiri dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya dokumen perencanaan kinerja ini di upload ke dalam aplikasi kinerja EKON GO sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perencanaan kinerja
3	Penyusunan Lapkin triwulanan	Terlaksana	ND permintaan penyusunan laporan kinerja triwulan I 2026, menjadi dasar pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama di triwulan I. Laporan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk dapat ditetapkan dan kemudian dimasukkan kedalam aplikasi berbasis kinerja EKON GO beserta dengan dokumen bukti dukungnya sebagai bentuk akuntabilitas pengukuran dan pelaporan kinerja
4	Penyusunan Renja 2026	Terlaksana	Dokumen perencanaan Renja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama telah ditetapkan pada awal tahun 2026. Renja ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan dasar penyusunan RKA. Dokumen Renja Biro MKKS dapat diakses pada link https://bit.ly/42JoTpt
5	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Setiap Kelompok Substansi di Biro MKKS memiliki admin PIC Srikandi. Pelaksanaan dokumentasi

			SRIKANDI seluruhnya telah dijalankan secara optimal oleh para PIC dengan terukurnya Tingkat penyelesaian Dokumen SRIKANDI yang efisien dan efektif.
6	Monev realisasi Anggaran	Terlaksana	Pagu anggaran Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama tahun 2026 sebesar Rp.1.656.784.000, hingga triwulan I ini telah terserap sebesar 37,38% untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja.
7	Penyusunan RPD	Terlaksana	ND Penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada triwulan I 2026
8	Monev pemanfaatan aplikasi E-Kinerja BKN	Terlaksana	Seluruh pegawai MKKS pada Kelompok Substansi Program Anggaran, Data Sistem Informasi, penguatan Fasilitas Kinerja dan Program Anggran telah memanfaatkan aplikasi E-Kinerja dengan bukti terselesaikannya penyusunan Target Sasaran Pegawai Kinerja tahun 2026 dan terselesaikannya penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Triwulan I yang telah ditandatangani oleh Plt. Karo Biro MKKS dan pegawai yang bersangkutan. Kemudian dilaporkan kepada SDM untuk dapat ditindaklanjuti
9	Penyusunan bahan LOM	Terlaksana	Biro Manajemen Kinerja membantu penyusunan bahan paparan <i>breakfast meeting</i> evaluasi capaian kinerja tahun 2025 dan target kinerja tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Kemenko Ekon pada bulan April 2026
10	Monev pencatatan SIRUP	Terlaksana	Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi pencatatan SIRUP.
11	Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK	Terlaksana	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama melalui portal social media @Biro.MKKS melaksanakan kegiatan publikasi tentang kegiatan <i>Forum Group Discussion</i> ,

			Award Ceremony, Sosialisai, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian yang seluruhnya disertai dengan penggunaan logo BerAKHLAK.
--	--	--	--

Hingga Triwulan I tahun 2026, aktivitas kegiatan yang dapat mendongkrak tinggi tercapainya IKU ini adalah :

1. Penetapan pegawai sebagai *Person In Charge (PIC)* dalam mengawal dan menetapkan roadmap RB Biro MKKS 2026;
2. Melaksanakan digital *working system* dan evaluasi pelaksanaan *Work From Anywhere*;
3. Menandatangani piagam Manajemen Risiko, dan menyusun Kertas Kerja Formulir Profil Risiko, dan Mitigasi Risiko;
4. Melaksanakan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan kinerja;
5. Menindaklanjuti hasil rekomendasi dan catatan Laporan Hasil Evaluasi pada tingkat Kementerian dan Eselon I ;
6. Penguatan *digital filling system* dan integrasi dokumen berbasis *cloud*;
7. Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan rekonsiliasi rutin dengan auditor
8. Pelaksanaan *Coaching Clinic*, Bimtek, Workshop, dan *Capacity Building* pegawai dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan dan Triwulanan, SPIP, Penyusunan IKU, Renaksi Reformasi Birokrasi, Manajemen Risiko, Audit BPK, dsb-nya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

1. Optimalisasi Aplikasi SIMERSI
2. Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai (Google Drive, One Drive, dst)
3. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting kantor;

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 63.665,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pemenuhan Bukti Dukung Pelaksanaan RB triwulan I mengalami keterlambatan karena Persesmenko terkait Rencana Aksi RB belum ditetapkan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Menyiapkan bukti dukung pelaksanaan RB triwulan I dan menyampaikan bukti dukung dimaksud apabila Persesmenko Rencana Aksi telah ditetapkan.

6.2 Nilai AKIP Sekretariat

Latar Belakang

Nilai Evaluasi SAKIP merupakan nilai perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini sesuai dengan Permenko No. 8 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pedoman evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP yang meliputi empat komponen dan bobot, yaitu :

- (1) Komponen Perencanaan Kinerja : **30%**
Bobot Nilai:
(a) Keberadaan : **6%**; (b) Kualitas : **9 %**; dan (c) Pemanfaatan : **15%**
- (2) Komponen Pengukuran Kinerja : **30%**
Bobot Nilai:
(a) Keberadaan : **6%**; (b) Kualitas : **9 %**; dan (c) Pemanfaatan : **15%**
- (3) Komponen Pelaporan Kinerja : **20%**
Bobot Nilai:
(a) Keberadaan : **4%**; (b) Kualitas : **6 %**; dan (c) Pemanfaatan : **10%**
- (4) Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : **20%**
Bobot Nilai:
(a) Keberadaan : **4%**; (b) Kualitas : **6 %**; dan (c) Pemanfaatan : **10%**

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP internal

- (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan
- (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan
- (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik
- (4) B (Skor > 60-70); Baik
- (5) CC (>50-60); Cukup
- (6) C (>30-50); Kurang
- (7) D (0-30); Sangat Kurang

Nilai AKIP Sekretariat ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat. Penilaian evaluasi AKIP meliputi empat komponen, yaitu:

Nilai AKIP Internal = Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal
--

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2026, Nilai AKIP Sekretariat yang terealisasi sebesar 79,5. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan pada sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang telah selesai dilaksanakan hingga triwulan I 2026, dengan ringkasan :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-6.2				
6.2. Nilai SAKIP Sekretariat	Nilai	79,5	79,5**	100%

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan.

Nilai Akuntabilitas Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setiap tahun dikeluarkan oleh Inspektorat Kementerian. Pada triwulan I tahun 2026, belum dapat diukur nilai akhir AKIP 2026 Sekretariat. Penilaian Mandiri berdasarkan aktivitas di setiap triwulan dapat menjadi rujukan dalam mengukur hasil akhir nilai yang akan diperoleh pada akhir tahun 2026. Jika berdasarkan surat Inspektorat Kementerian No. PW.04.01/195/INS.M.EKON/11/2025 tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan bahwa nilai AKIP Sekretariat berada pada nilai 78,95 dengan predikat BB. Maka besar kemungkinan target nilai 79,5 di akhir tahun 2026 dapat tercapai. Pada tahun 2025, implementasi akuntabilitas kinerja berada pada level “Sangat Baik” dengan interpretasi bahwa terdapat gambaran akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan bukan hanya di level Eselon I.

Tabel 6.1 Nilai LHE AKIP Sekretariat (Eselon I)

Evaluasi Per Komponen LHE 2025	LHE 2025	Target 2026
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Area Perbaikan : • Terdapat dokumen perencanaan yang belum ditetapkan dan dipublikasikan • Indikator – indikator kinerja yang ada masih belum memenuhi kriteria SMART-C • Rencana Aksi masih bersifat general • Belum tersusun dan ditetapkannya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2025 secara formal oleh pejabat	26,61	26,78 (+0,17)
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Area Perbaikan : • Belum ada kebijakan terkait mekanisme pengumpulan data kinerja oleh KPI Manager di masing-masing unit kerja • Definisi dan cara mengukur indikator kinerja utama yang belum sesuai dengan Manual IKU • Manajemen data dukung yang belum Optimal • Belum terlaksananya pemantauan dan pengukuran capaian kinerja atas seluruh pegawai (Masih terdapat pegawai yang belum melaksanakan pengisian SKP) • Belum diimplementasikannya SOP Reward and Punishment • Pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian kebijakan dan anggaran	22,40	22,55 (+0,15)
Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Area Perbaikan : • Belum dilaksanakannya reviu atas laporan kinerja triwulanan • Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat belum memuat kualitas keberhasilan atau kegagalan capaian target beserta Upaya dan hambatan • Kualitas penyajian laporan kinerja tahunan	15,01	15,08 (+0,07)

Nilai Komponen Evaluasi Kinerja Area Perbaikan : • Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menyeluruh pada level eselon II (Inspektorat) • Dasar pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum didukung dengan Surat Tugas • Laporan Hasil Evaluasi Internal Sekretariat belum menjadi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya	14,93	15,09 (+0,16)
Nilai Total Evaluasi AKIP Final	78,95	79,5 (+0,55)

Sampai dengan laporan ini disusun, Biro MKKS telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan terutama pada sisi komponen perencanaan kinerja, sehingga penambahan poin sekitar 0,17 diproyeksikan dapat dipenuhi. Adapun upaya perbaikan lain yang telah dilakukan oleh Biro MKKS pada triwulan I adalah peningkatan kualitas penyajian laporan kinerja tahunan yang diharapkan dapat menyumbang 0,02 poin pada nilai komponen laporan kinerja. Berdasarkan pada pelaksanaan upaya perbaikan pada triwulan I, maka diproyeksikan telah terjadi kenaikan sebesar 0,19 poin.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I tahun 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Nilai SAKIP Sekretariat			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Penyusunan matriks tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi LHE AKIP 2025 Inspektorat	Terlaksana	LHE 2025 Sekretariat yang dikeluarkan oleh Inspektorat No. PW.04.01/195/INS.M.EKO N/11/2025 termuat nilai Akuntabilitas Sekretariat Kementerian Perekonomian dengan nilai 78,95 dengan predikat “BB” menjadi dasar penyusunan matriks perbaikan AKIP Sekretariat tahun 2026. Matriks perbaikan AKIP Sekretariat Kementerian telah disusun sebagai Upaya nyata dalam menindaklanjuti catatan dan rekomendasi dari Inspektorat, sehingga target 79,5 di tahun 2026 dapat tercapai.
2	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan	Terlaksana	Penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun

	Lampiran Kinerja tahun 2026 di level eselon I dan II		2026 telah dilaksanakan oleh Sekretariat pada level Eselon I dan II yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Seluruh dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat yang telah ditetapkan di upload ke dalam Aplikasi Kinerja pada sisi Perencanaan. https://kinerja.ekon.go.id
3	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I	Tertunda atau Digeser	Hingga bulan April 2026, Sekretariat Kementerian Perekonomian masih menyusun draft Laporan Kinerja triwulan I berdasarkan konsep laporan kinerja triwulanan yang telah dikonsepskan. Laporan kinerja triwulan I Sekretariat yang telah disusun kemudian ditetapkan oleh Pimpinan yang dilanjutkan dengan proses upload ke dalam Aplikasi Kinerja Ekon GO beserta dengan Data Dukung Kinerja di triwulan I (https://kinerja.ekon.go.id)
4	Pelaksanaan Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I	Tertunda atau Digeser	Pengukuran capaian indikator kinerja masih dalam proses, beriringan dengan penyusunan draft laporan kinerja triwulanan I. Pengukuran dilaksanakan berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan pada Manual IKU.
5	Monitoring Capaian NKO Triwulan I	Tertunda atau Diseger	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan rerata dari hasil Nilai rata-rata Sasaran Strategis. Hingga triwulan I, capaian Nilai Kinerja Organisasi masih dalam perhitungan
6	Penggunaan Ekon.GO untuk Optimalisasi Kinerja	Terlaksana	Optimalisasi aplikasi kinerja pada bagian pengukuran dilaksanakan dengan : (a)

	dalam Pengukuran dan Pelaporan		penyesuaian formulasi pada aplikasi kinerja; (b) otomatisasi perhitungan formulasi; dan (c) pemeriksaan kembali hasil pengukuran Pada sisi pelaporan dilakukan optimalisasi dengan cara menyempurnakan konsep laporan dan
--	--------------------------------	--	--

Upaya nyata dari seluruh kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

1. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Sekretariat yang meliputi Sasaran Target dan Sasaran Triwulan I
2. Melaksanakan *Kick Off Meeting* penyusunan laporan kinerja organisasi di seluruh unit kerja
3. Menyusun laporan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) tahun 2025 di level Eselon I dan II Sekretariat Kemenko Perekonomian.
4. Melaksanakan dialog kinerja bersama pimpinan, untuk membahas realisasi anggaran TA. 2025, capaian indikator kinerja utama, dan laporan program kerja tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026 pada level entitas eselon II di Sekretariat Kemenko Perekonomian
5. Menyusun *cascading* kinerja dalam bentuk dokumen Matriks Peran Hasil, sehingga dapat terlihat keterhubungan kinerja dari level atas hingga level individu pada Sekretariat Kemenko Perekonomian.
6. Pengisian aplikasi berbasis kinerja EKON.GO pada direktori Perencanaan Kinerja (RPJMN K/L, Renstra Sekretariat, RKP, RKA, Renja, dan PK 2026) Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja tahun 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Pelaksanaan kegiatan *Coaching Clinic* dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola kinerja di unit kerja
- Penunjukkan PIC per Biro dan optimalisasi koordinasi dengan PIC tersebut. Hal ini membuat pola kerja lebih cepat dan efisien
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai (Google Drive, One Drive, dst);
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting kantor;
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelola kinerja EKON GO;

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 13.065,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Implementasi SOP *reward and punishment* di lingkungan Sekretariat yang belum optimal
2. Informasi kualitas laporan kinerja yang disusun PIC entitas eselon II unit kerja, belum menggambarkan kualitas atas keberhasilan/kegagalan yang tertuang pada subbab Upaya nyata dan/atau Hambatan
3. Tingkat kepatuhan waktu pengumpulan laporan kinerja dan dokumen bukti dukung kinerja yang masih rendah.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka telah disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan yaitu :

1. Mereviu dan mengevaluasi penerapan SOP *reward and punishment* yang ada. Hasil reviu dan evaluasi selanjutnya dijadikan dasar perbaikan penyusunan SOP.
2. Mereviu kualitas laporan kinerja dan mensosialisasi hasil reviu MKKS kepada seluruh Biro
3. Mengoptimalkan peran PIC Kinerja di masing-masing Biro sebagai lini pertama terkait ketaatan dokumen pelaporan.

Jakarta, April 2026
Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama



Evita Manthovani